



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN *AUDITED*
BAGIAN ANGGARAN 055
PERIODE SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2020

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

BAGIAN ANGGARAN 055

**LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERIODE SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2020
*(Audited)***

Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310


Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian PPN/Bappenas. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 5 Mei 2021

WA Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 



Suharso Monoarfa

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Pernyataan Telah Direviu	ix
Pernyataan Tanggung Jawab.....	x
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	20
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	67
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	85
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Satker Kementerian PPN/Bappenas TA 2020.....	10
Tabel 2 Penggolongan Kualitas Piutang.....	14
Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	17
Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	18
Tabel 5 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2020.....	20
Tabel 6 Rincian Anggaran per Program per 31 Desember 2020	20
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2020	21
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	21
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020	22
Tabel 10 Rincian Belanja Berdasarkan Program per 31 Desember 2020	23
Tabel 11 Rincian Belanja Berdasarkan Bagian Anggaran per 31 Desember 2020.....	23
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020.....	23
Tabel 13 Total Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri Kas (Termasuk Belum Proses SPHL)	24
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019.....	25
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	26
Tabel 16 Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid 19 per 31 Desember 2020.....	26
Tabel 17 Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19 per 31 Desember 2020.....	26
Tabel 18 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi Covid 19 per 31 Desember 2020.....	27
Tabel 19 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	27
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	28
Tabel 21 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	29
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	29
Tabel 23 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	30
Tabel 24 Rincian Pembagian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) TA 2020.....	30
Tabel 25 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	31
Tabel 26 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	32
Tabel 27 Rincian Belanja Dibayar di Muka Satker Bappenas.....	32
Tabel 28 Perbandingan Rincian Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	33
Tabel 29 Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	33
Tabel 30 Perbandingan Rincian Penyisihan Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	34
Tabel 31 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2020.....	35
Tabel 32 Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	35

Tabel 33 Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BL TGR/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	36
Tabel 34 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-BL TGR/TGR per 31 Desember 2020.....	36
Tabel 35 Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	37
Tabel 36 Mutasi Persediaan	37
Tabel 37 Saldo Persediaan pada Satuan Kerja	38
Tabel 38 Mutasi Barang Konsumsi.....	39
Tabel 39 Rincian Barang Rusak/Usang.....	41
Tabel 40 Mutasi Bahan untuk Pemeliharaan	41
Tabel 41 Mutasi Suku Cadang	42
Tabel 42 Mutasi Pita Cukai, Materai dan Leges.....	43
Tabel 43 Mutasi Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat.....	44
Tabel 44 Mutasi Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat.....	44
Tabel 45 Mutasi Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat.....	45
Tabel 46 Mutasi Aset Lain-lain untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	46
Tabel 47 Mutasi Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat.....	46
Tabel 48 Mutasi Bahan Baku.....	47
Tabel 49 Mutasi Persediaan Lainnya	48
Tabel 50 Perbandingan tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	49
Tabel 51 Mutasi Aset Tetap Berupa Tanah.....	49
Tabel 52 Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2020	50
Tabel 53 Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	51
Tabel 54 Mutasi Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin	52
Tabel 55 Perbandingan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	54
Tabel 56 Mutasi Transaksi Terhadap Gedung dan Bangunan	54
Tabel 57 Perbandingan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	55
Tabel 58 Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan	55
Tabel 59 Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	56
Tabel 60 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020	56
Tabel 61 Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya.....	56
Tabel 62 Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	58
Tabel 63 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020.....	59
Tabel 64 Perbandingan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	60
Tabel 65 Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	60
Tabel 66 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020	60
Tabel 67 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud.....	61
Tabel 68 Perbandingan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	62
Tabel 69 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2020.....	63

Tabel 70 Mutasi Aset Lain-lain	63
Tabel 71 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020.....	64
Tabel 72 Perbandingan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	64
Tabel 73 Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	65
Tabel 74 Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	66
Tabel 75 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	66
Tabel 76 Perbandingan Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	67
Tabel 77 Perbandingan PNBPN Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2020.....	67
Tabel 78 Selisih nilai PNBPN Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2020.....	68
Tabel 79 Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	68
Tabel 80 Perbandingan Beban Pegawai pada LO dan LRA per 31 Desember 2020.....	69
Tabel 81 Selisih Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA per 31 Desember 2020.....	70
Tabel 82 Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	71
Tabel 83 Perbandingan Rincian Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2020.....	71
Tabel 84 Selisih nilai Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2020.....	71
Tabel 85 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	72
Tabel 86 Perbandingan Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 31 Desember 2020.....	73
Tabel 87 Selisih nilai Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 31 Desember 2020.....	74
Tabel 88 Perhitungan Temuan Akun Belanja Jasa Penanganan Pandemi COVID-19 ..	75
Tabel 89 MPH per 31 Desember 2020	76
Tabel 90 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	77
Tabel 91 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2020.....	77
Tabel 92 Selisih nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2020.....	78
Tabel 93 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	78
Tabel 94 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 31 Desember 2020.....	79
Tabel 95 Selisih Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 31 Desember 2020.....	79
Tabel 96 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	80
Tabel 97 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada LO dan LRA per 31 Desember 2020	80

Tabel 98 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada LO dan LRA per 31 Desember 2020	81
Tabel 99 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	81
Tabel 100 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	82
Tabel 101 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	82
Tabel 102 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dan LRA per 31 Desember 2020	82
Tabel 103 Realisasi Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2020	83
Tabel 104 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	83
Tabel 105 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2020	83
Tabel 106 Selisih Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2020	84
Tabel 107 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	84
Tabel 108 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya antara LO dan LRA per 31 Desember 2020.....	84
Tabel 109 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	85
Tabel 110 Rincian Koreksi atas Reklasifikasi	86
Tabel 111 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	86
Tabel 112 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	86
Tabel 113 Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	87
Tabel 114 Rincian Koreksi Lainnya Berdasar Satker	87
Tabel 115 Rincian Koreksi Lain-lain Satker Bappenas	87
Tabel 116 Rincian Koreksi Lain-lain Satker KNKS	88
Tabel 117 Rincian Koreksi Lain-lain Satker ICCTF	88
Tabel 118 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	88
Tabel 119 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker	89
Tabel 120 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per Satker.....	89
Tabel 121 Rincian Transfer Masuk per Satker	90
Tabel 122 Rincian Transfer Keluar per Satker.....	90
Tabel 123 Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker	91
Tabel 124 Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per Satker.....	91
Tabel 125 Selisih Realisasi antara LKPP dan CALK.....	94
Tabel 126 Koreksi SPM Tahun Anggaran 2020	96
Tabel 127 Indikasi Konvergensi Implementasi Kegiatan Stunting DIPA Bappenas	98
Tabel 128 Rincian TK/TM Satker MCC.....	100
Tabel 129 Rincian TK/TM Satker KNKS	101
Tabel 130 Rincian Selisih Antara SAIBA dan SIMAK MCC	101
Tabel 131 Rincian Perbedaan Saldo Awal SIMAK dan SAIBA Satker MCC.....	102

..

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 202022

LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja;
2. Daftar Realisasi Belanja Hibah sudah disahkan dan belum disahkan;
3. Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas ;
4. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*);
5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima;
6. Daftar Piutang Bukan Pajak;
7. Daftar Piutang BOT dan Piutang Lainnya;
8. Daftar Rincian Persediaan;
9. Laporan BMN;
10. Daftar Barang Milik Negara Yang Rusak Berat;
11. Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga;
12. Daftar Pendapatan Diterima Dimuka;
13. Daftar Pinjaman dan Hibah;
14. Daftar Rekening Pemerintah dan Rekening Lainnya;

LAMPIRAN PENDUKUNG

15. Neraca Percobaan;
16. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan;
17. Daftar Realisasi Satuan Kerja Pusat;
18. Daftar Realisasi Dana Dekonsentrasi;
19. Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran;
20. Laporan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK Atas LKKL Tahun 2019;
21. Rencana Tindak Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK Atas LKKL Tahun 2019;
22. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Bagian Satker;
23. Pernyataan Tanggung Jawab Unit Badan Lainnya Bagian Satker;
24. Daftar Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah;
25. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk Tahun Anggaran 2020 Bagian Anggaran 055 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian PPN/Bappenas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 5 Mei 2021
Inspektur Utama



Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA
NIP. 19630225 199003 1 003



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 5 Mei 2021

WA Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional *trng*

Suharso Monoarfa

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Semester II Tahun Anggaran 2020 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2020 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.258.763.546,00 dan estimasi Pendapatan-LRA adalah sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.116.861.179.149,00 atau mencapai 91,71 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.217.757.708.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.661.305.513.233,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp49.301.922.071,00, Aset Tetap (*Netto*) sebesar Rp1.973.240.338.992,00, Piutang Jangka Panjang (*Netto*) sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya (*Netto*) sebesar Rp638.763.252.170,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.276.921.700,00 dan Rp2.659.028.591.533,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp611.470.187,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.992.195.317.117,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(1.991.583.846.930,00) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar

Biasa masing-masing sebesar Rp103.607.561,00, dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(1.991.480.239.369,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp2.629.750.217.776,00. Mutasi selama Semester II Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Defisit-LO sebesar Rp(1.991.480.239.369,00), koreksi-koreksi senilai Rp55.929.612.705,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.964.829.000.421,00. Sehingga Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp2.659.028.591.533,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2020
DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020		% thd Angg	31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	2.258.763.546	0,00	4.895.435.183
JUMLAH PENDAPATAN		-	2.258.763.546	0,00	4.895.435.183
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	179.573.052.000	149.301.536.269	83,14	169.235.794.623
Belanja Barang	B.4	951.958.593.000	884.565.670.476	92,92	1.129.733.334.979
Belanja Modal	B.5	86.226.063.000	82.993.972.404	96,25	281.229.565.563
JUMLAH BELANJA		1.217.757.708.000	1.116.861.179.149	91,71	1.580.198.695.165

Jakarta, 5 Mei 2021

WA Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional *fin*



Suharso Monoarfa

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 17/05/21 6:49 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	2,258,763,546	(2,258,763,546)	0	0	4,895,435,183	(4,895,435,183)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	2,258,763,546	(2,258,763,546)	0	0	4,895,435,183	(4,895,435,183)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	179,573,052,000	149,301,536,269	30,271,515,731	83	176,117,062,000	169,235,794,623	6,881,267,377	96
	BELANJA BARANG	951,958,593,000	884,565,670,476	67,392,922,524	93	1,336,435,220,000	1,129,733,334,979	206,701,885,021	85
	BELANJA MODAL	86,226,063,000	82,993,972,404	3,232,090,596	96	324,707,225,000	281,229,565,563	43,477,659,437	87
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	1,217,757,708,000	1,116,861,179,149	100,896,528,851	92	1,837,259,507,000	1,580,198,695,165	257,060,811,835	86
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA

II

II. NERACA

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	77.254.593	38.136.194
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	638.208.958	5.967.367.257
Belanja Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>)	C.3	41.221.576.013	43.207.682.176
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.4	502.342.500	2.287.530
Piutang PNB	C.5	542.701.763	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	(2.628.360)	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.7	-	51.805.080
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - BL TGR/TGR	C.8	-	(259.025)
Persediaan	C.9	6.322.466.604	88.524.541.338
Persediaan yang Belum Diregister		-	-
Jumlah Aset Lancar		49.301.922.071	137.791.560.550
ASET TETAP			
Tanah	C.10	1.541.450.676.000	1.484.443.750.305
Peralatan dan Mesin	C.11	469.890.509.737	433.773.685.330
Peralatan dan Mesin Belum Diregister		-	-
Gedung dan Bangunan	C.12	159.920.519.326	157.938.995.269
Gedung dan Bangunan Belum Diregister		-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.13	6.020.002.566	6.020.002.566
Aset Tetap Lainnya	C.14	111.114.920.719	101.395.867.321
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	C.15	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16	(315.156.289.356)	(258.202.199.382)
Aset Tetap yang Belum Diregister		-	-
Jumlah Aset Tetap		1.973.240.338.992	1.925.370.101.409
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.17	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.18	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak ketiga	C.19	490.209.375.000	490.209.375.000
Aset Tak Berwujud	C.20	131.912.902.018	55.783.312.439
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	66.639.026.947	68.180.544.422
Aset Lainnya yang Belum Diregister		-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(49.998.051.795)	(42.802.462.277)
Jumlah Aset Lainnya		638.763.252.170	571.370.769.584
JUMLAH ASET			
		2.661.305.513.233	2.634.532.431.543
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	2.107.379.659	4.546.685.157
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.25	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.26	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.27	82.513.583	197.392.416
Utang Muka dari KPPN	C.28	77.254.593	38.136.194
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29	9.773.865	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.276.921.700	4.782.213.767
JUMLAH KEWAJIBAN			
		2.276.921.700	4.782.213.767
EKUITAS			
Ekuitas	C.30	2.659.028.591.533	2.629.750.217.776
JUMLAH EKUITAS			
		2.659.028.591.533	2.629.750.217.776
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
		2.661.305.513.233	2.634.532.431.543

Jakarta, 5 Mei 2021

WA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

fmm



Suharso Monoarfa

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 17/05/2021 6:48 AM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	77,254,593	38,136,194	39,118,399	102.58
Kas Lainnya dan Setara Kas	638,208,958	5,967,367,257	(5,329,158,299)	(89.31)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	41,221,576,013	43,207,682,176	(1,986,106,163)	(4.60)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	502,342,500	2,287,530	500,054,970	21,860.04
Piutang Bukan Pajak	542,701,763	0	542,701,763	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(2,628,360)	0	(2,628,360)	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	540,073,403	0	540,073,403	0.00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	51,805,080	(51,805,080)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	(259,025)	259,025	(100.00)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	0	51,546,055	(51,546,055)	(100.00)
Persediaan	6,322,466,604	88,524,541,338	(82,202,074,734)	(92.86)
JUMLAH ASET LANCAR	49,301,922,071	137,791,560,550	(88,489,638,479)	(64.22)
ASET TETAP				
Tanah	1,541,450,676,000	1,484,443,750,305	57,006,925,695	3.84
Peralatan dan Mesin	469,890,509,737	433,773,685,330	36,116,824,407	8.33
Gedung dan Bangunan	159,920,519,326	157,938,995,269	1,981,524,057	1.25
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,020,002,566	6,020,002,566	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	111,114,920,719	101,395,867,321	9,719,053,398	9.59
AKUMULASI PENYUSUTAN	(315,156,289,356)	(258,202,199,382)	(56,954,089,974)	22.06
JUMLAH ASET TETAP	1,973,240,338,992	1,925,370,101,409	47,870,237,583	2.49
ASET LAINNYA				
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	490,209,375,000	490,209,375,000	0	0.00
Aset Tak Berwujud	131,912,902,018	55,783,312,439	76,129,589,579	136.47
Aset Lain-lain	66,639,026,947	68,180,544,422	(1,541,517,475)	(2.26)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(49,998,051,795)	(42,802,462,277)	(7,195,589,518)	16.81
JUMLAH ASET LAINNYA	638,763,252,170	571,370,769,584	67,392,482,586	11.79
JUMLAH ASET	2,661,305,513,233	2,634,532,431,543	26,773,081,690	1.02
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,107,379,659	4,546,685,157	(2,439,305,498)	(53.65)
Pendapatan Diterima Dimuka	82,513,583	197,392,416	(114,878,833)	(58.20)
Uang Muka dari KPPN	77,254,593	38,136,194	39,118,399	102.58
Utang Jangka Pendek Lainnya	9,773,865	0	9,773,865	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,276,921,700	4,782,213,767	(2,505,292,067)	(52.39)
JUMLAH KEWAJIBAN	2,276,921,700	4,782,213,767	(2,505,292,067)	(52.39)
EKUITAS				
EKUITAS				

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
 PER DESEMBER 2020 DAN 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tgl. Cetak 17/05/2021 6:48 AM
 lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Ekuitas	2,659,028,591,533	2,629,750,217,776	29,278,373,757	1.11
JUMLAH EKUITAS	2,659,028,591,533	2,629,750,217,776	29,278,373,757	1.11
JUMLAH EKUITAS	2,659,028,591,533	2,629,750,217,776	29,278,373,757	1.11
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,661,305,513,233	2,634,532,431,543	26,773,081,690	1.02

LAPORAN OPERASIONAL

III

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2020
DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	611.470.187	526.895.890
JUMLAH PENDAPATAN		611.470.187	526.895.890
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	149.074.878.526	161.031.193.376
Beban Persediaan	D.3	13.584.409.156	18.275.935.263
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.518.044.198.005	1.585.356.306.021
Beban Pemeliharaan	D.5	17.953.512.020	17.541.575.727
Beban Perjalanan Dinas	D.6	112.666.543.427	365.843.175.874
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	98.781.019.703	903.122.004.477
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	82.088.076.115	68.644.464.941
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	2.680.165	259.025
JUMLAH BEBAN		1.992.195.317.117	3.119.814.914.704
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.991.583.846.930)	(3.119.288.018.814)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	512.878.889	1.023.539.644
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	137.500.909	461.465.409
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		375.377.980	562.074.235
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	8.994.562.362	15.958.915.433
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	9.266.332.781	14.482.630.961
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(271.770.419)	1.476.284.472
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		103.607.561	2.038.358.707
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.14	-	-
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.991.480.239.369)	(3.117.249.660.107)

Jakarta, 5 Mei 2021

WA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 


Suharso Monoarfa

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN

: 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 17/05/21 6:49 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lo_kl --

Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	611,470,187	526,895,890	84,574,297	16.051
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	611,470,187	526,895,890	84,574,297	16.051
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	611,470,187	526,895,890	84,574,297	16.051
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	149,074,878,526	161,031,193,376	(11,956,314,850)	(7.425)
Beban Persediaan	13,584,409,156	18,275,935,263	(4,691,526,107)	(25.671)
Beban Barang dan Jasa	1,518,044,198,005	1,585,356,306,021	(67,312,108,016)	(4.246)
Beban Pemeliharaan	17,953,512,020	17,541,575,727	411,936,293	2.348
Beban Perjalanan Dinas	112,666,543,427	365,843,175,874	(253,176,632,447)	(69.204)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	98,781,019,703	903,122,004,477	(804,340,984,774)	(89.062)
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 17/05/21 6:49 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	82,088,076,115	68,644,464,941	13,443,611,174	19.584
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2,680,165	259,025	2,421,140	934.713
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,992,195,317,117	3,119,814,914,704	(1,127,619,597,587)	(36.144)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,991,583,846,930)	(3,119,288,018,814)	1,127,704,171,884	(36.153)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	375,377,980	562,074,235	(186,696,255)	(33.216)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	512,878,889	1,023,539,644	(510,660,755)	(49.892)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	137,500,909	461,465,409	(323,964,500)	(70.203)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(271,770,419)	1,476,284,472	(1,748,054,891)	(118.409)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,994,562,362	15,958,915,433	(6,964,353,071)	(43.639)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,266,332,781	14,482,630,961	(5,216,298,180)	(36.018)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	103,607,561	2,038,358,707	(1,934,751,146)	(94.917)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1,991,480,239,369)	(3,117,249,660,107)	1,125,769,420,738	(36.114)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1,991,480,239,369)	(3,117,249,660,107)	1,125,769,420,738	(36.114)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2020
DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1	2.629.750.217.776	1.606.311.148.017
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.991.480.239.369)	(3.117.249.660.107)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	55.929.612.705	1733.431.226.092
Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	-	-
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.3	2.808.800	(13.638.230.904)
Selisih Revaluasi Aset	E.3.4	57.006.925.695	1342.010.649.166
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.5	(195.763.386)	407.852.279.839
Koreksi Lain-lain	E.3.6	(884.358.404)	(2.793.472.009)
JUM LAH		55.929.612.705	1.733.431.226.092
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.964.829.000.421	2.407.257.503.774
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		29.278.373.757	1023.439.069.759
EKUITAS AKHIR	E.5	2.659.028.591.533	2.629.750.217.776

Jakarta, 5 Mei 2021

WA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 



Suharso Monoarfa

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 055

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 17/05/21 6:03 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,629,750,217,776	1,606,311,148,017	1,023,439,069,759	63.714
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,991,480,239,369)	(3,117,249,660,107)	1,125,769,420,738	(36.114)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	55,929,612,705	1,733,431,226,092	(1,677,501,613,387)	(96.773)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	2,808,800	(13,638,230,904)	13,641,039,704	(100.02 1)
SELISIH REVALUASI ASET	57,006,925,695	1,342,010,649,166	(1,285,003,723,471)	(95.752)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(195,763,386)	407,852,279,839	(408,048,043,225)	(100.04 8)
LAIN-LAIN	(884,358,404)	(2,793,472,009)	1,909,113,605	(68.342)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,964,829,000,421	2,407,257,503,774	(442,428,503,353)	(18.379)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	29,278,373,757	1,023,439,069,759	(994,160,696,002)	(97.139)
EKUITAS AKHIR	2,659,028,591,533	2,629,750,217,776	29,278,373,757	1.113

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Profil &
Kebijakan
Teknis*

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016, Bappenas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka

- regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
2. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
 3. Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/ Daerah;
 4. Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 5. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
 6. Pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional
 7. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
 8. Pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
 9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS;
 10. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan BAPPENAS;
 11. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BAPPENAS; dan
 12. Pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di BAPPENAS.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, dalam melaksanakan tugasnya Menteri PPN/Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama,

Staf Ahli, Inspektorat Utama, dan Deputi yang masing-masing membidangi bidang-bidang tertentu, serta Pusat.

Susunan Organisasi Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas :

1. Menteri/Kepala;
2. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Ekonomi;
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
8. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
9. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
10. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
11. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
12. Inspektorat Utama;
13. Staf Ahli;
14. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
15. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
16. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian PPN/Bappenas. Jumlah satuan kerja (satker) aktif di lingkup Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2020 berdasarkan data di aplikasi *e-Rekon&LK G2* adalah sejumlah 35 Satker. Rekapitulasi satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Daftar Satker Kementerian PPN/Bappenas TA 2020

No.	Satuan Kerja
1	Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas
2	Pengelola Hibah Millenium Challenge Indonesia
3	MWA ICCTF
4	Komite Nasional Keuangan Syariah
5	Bappeda Propinsi Jawa Tengah
6	Bappeda Propinsi DIY
7	Bappeda Propinsi Jawa Timur
8	Bappeda Propinsi Aceh
9	Bappeda Propinsi Sumatera Utara
10	Bappeda Propinsi Sumatera Barat
11	Bappeda Propinsi Riau
12	Bappeda Propinsi Jambi
13	Bappeda Propinsi Sumatera Selatan
14	Bappeda Propinsi Lampung
15	Bappeda Propinsi Kalimantan Barat
16	Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah
17	Bappeda Propinsi Kalimantan Selatan
18	Bappeda Propinsi Kalimantan Timur
19	Bappeda Propinsi Sulawesi Utara
20	Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah
21	Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan
22	Bappeda Propinsi Sulawesi Tenggara
23	Bappeda Propinsi Maluku
24	Bappeda Propinsi Bali
25	Bappeda Propinsi NTB
26	Bappeda Propinsi NTT
27	Bappeda Propinsi Bengkulu
28	Bappeda Propinsi Maluku Utara
29	Bappeda Propinsi Banten
30	Bappeda dan Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
31	Bappeda Propinsi Gorontalo
32	Bappeda Propinsi Kepulauan Riau
33	Bappeda Propinsi Papua Barat
34	Bappeda Propinsi Sulawesi Barat
35	Bappeda Propinsi Kalimantan Utara

*Basis
Akuntansi*

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian PPN/Bappenas menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA **(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan–LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan Jasa Giro diakui pada saat terbitnya rekening koran per akhir bulan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Belanja Hibah diakui pada saat terjadi pengeluaran kas Negara.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban Hibah diakui pada saat resume tagihan (SP2HL).

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan

keajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan, mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan

dengan survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusunan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dengan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian PPN/Bappenas telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja tersaji sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	180.164.552.000	179.573.052.000
Belanja Barang	1.343.653.147.000	951.958.593.000
Belanja Modal	305.349.099.000	86.226.063.000
Jumlah Belanja	1.829.166.798.000	1.217.757.708.000

Sedangkan apabila dilihat dari program Kementerian PPN/Bappenas maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Anggaran per Program per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Program	31 Desember 2020	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	867.646.952.000	564.268.117.000
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	10.000.000.000	6.329.526.000
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	951.519.846.000	647.160.065.000
Jumlah	1.829.166.798.000	1.217.757.708.000

Realisasi
Pendapatan
Rp2.258.763.546,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.258.763.546,00 sedangkan estimasi pendapatan adalah sebesar Rp0,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	86.878.889	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	20.552.700	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	2.287.530	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	86.805.080	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	66.258.848	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	1.995.640.499	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	340.000	-
Jumlah	-	2.258.763.546	-

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	86.878.889	32.388.888	168,24
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	991.150.756	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20.552.700	135.922.678	-84,88
Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	-	360.047.373	-100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.638.200	-100,00
Pendapatan Denda Lainnya	-	30.000.000	-100,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	86.805.080	-	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	2.287.530	10.802	21076,91
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	66.258.848	36.389.578	82,08
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.995.640.499	3.270.441.023	-38,98
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	37.445.535	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	340.000	350	97042,86
Jumlah	2.258.763.546	4.895.435.183	-53,86

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2020 antara lain berasal dari Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Bukan Bendahara, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Penerimaan sebesar Rp86.878.889,00 berasal dari lelang Peralatan dan Mesin berupa 9 unit brandkas yang telah dilakukan penghapusan di tahun 2020 sebesar Rp16.171.819,00 dan 1 unit kijang innova G yang akan dilakukan penghapusan di tahun 2021 sebesar Rp70.707.070,00.

Realisasi Belanja
Rp1.116.861.179.149,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.116.861.179.149,00 atau mencapai 91,71 persen dari anggaran belanja sebesar Rp1.217.757.708.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut:

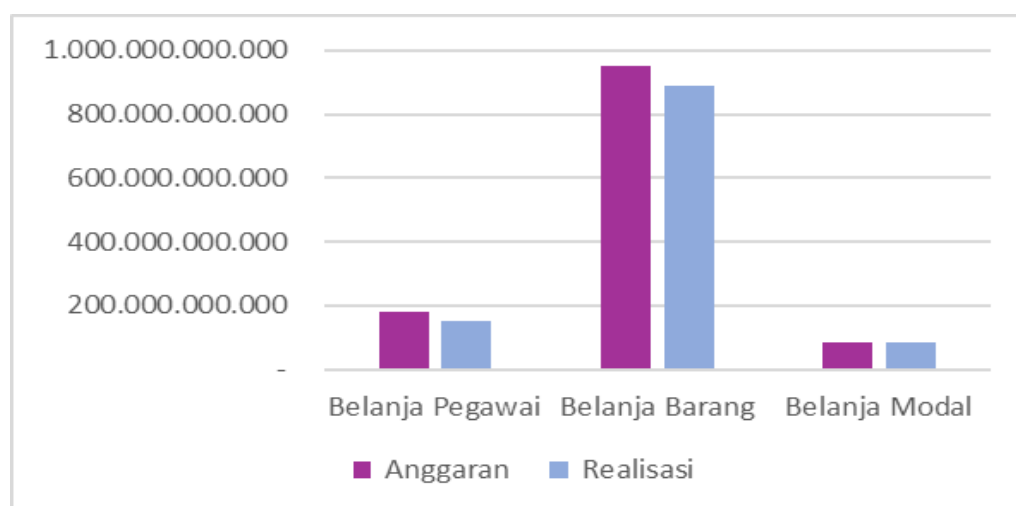
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	179.573.052.000	149.301.536.269	83,14
Belanja Barang	951.958.593.000	884.565.670.476	92,92
Belanja Modal	86.226.063.000	82.993.972.404	96,25
Total Belanja Kotor	1.217.757.708.000	1.116.861.179.149	91,71
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah	1.217.757.708.000	1.116.861.179.149	91,71

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020



Realisasi belanja menurut sumber dana/program/kegiatan, eselon1/wilayah/satker, jenis belanja/eselon1/akun dapat dilihat pada lampiran 1.

Realisasi belanja berdasarkan program dan anggaran per 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Belanja Berdasarkan Program per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Program	31 Desember 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	564.268.117.000	502.782.753.272	89,104
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	6.329.526.000	6.257.121.641	98,856
Program Perencanaan Bappenas	647.160.065.000	612.703.657.205	94,68
Total	1.217.757.708.000	1.121.743.532.118	92,12
Pengembalian	-	(4.882.352.969)	-
Jumlah	1.217.757.708.000	1.116.861.179.149	(92,12)

Tabel 11 Rincian Belanja Berdasarkan Bagian Anggaran per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Bagian Anggaran	31 Desember 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
BA 055	1.217.757.708.000	1.121.743.532.118	92,12
Pengembalian	-	(4.882.352.969)	-
Jumlah	1.217.757.708.000	1.116.861.179.149	91,71

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan mata anggaran untuk per 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	149.301.536.269	169.235.794.623	(11,78)
Belanja Barang	884.565.670.476	1.129.733.334.979	(21,70)
Belanja Modal	82.993.972.404	281.229.565.563	(70,49)
Jumlah	1.116.861.179.149	1.580.198.695.165	(29,32)

Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 29,32 persen dibanding realisasi per 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Terdapat penghematan/*refocusing* anggaran;
2. Terdapat pembatasan perjalanan dinas baik luar negeri maupun dalam negeri;
3. Terdapat pembatasan pelaksanaan konsinyering;
4. Berkurangnya pengajuan jamuan makan karena rapat dilakukan secara *virtual*; dan
5. Berkurangnya kegiatan Rapat Dalam Kantor karena mengikuti protokol kesehatan.

Jumlah realisasi belanja tersebut termasuk dari hibah langsung uang yang berasal dari Hibah Langsung Luar Negeri Uang yang sudah terbit SPHL sebesar Rp12.315.392.084,00 terdiri dari UNICEF senilai Rp3.960.189.576,00, UNFPA senilai Rp3.459.860.484,00 dan READSI senilai Rp4.895.342.024,00. Adapun yang belum proses SPHL senilai Rp58.134.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 13 Total Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri Kas
(Termasuk Belum Proses SPHL)

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Realisasi belanja hibah langsung uang :	
1. Terbit SPHL	12.315.392.084
2. Belum terbit SPHL	-
3. Belum proses SPHL	58.134.000
Jumlah	12.373.526.084

Realisasi belanja hibah langsung uang yang telah terbit SPHL per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.315.392.084,00. Realisasi belanja hibah langsung uang yang belum proses SPHL per 31 Desember 2020 sebesar Rp58.134.000,00 yang merupakan realisasi belanja pada satker Kementerian/Bappenas (IFAD).

Rincian penjelasan dapat dilihat pada lampiran 2.

Dana hibah langsung luar negeri kas tersebut langsung disalurkan oleh Mitra Pembangunan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk membiayai suatu program/kegiatan/proyek tertentu melalui rekening unit pelaksana masing-masing program/kegiatan/proyek di Kementerian PPN/Bappenas. Apabila program/kegiatan/proyek telah selesai (*project closed*) dan masih terdapat sisa dana di rekening, maka dana tersebut disetor kembali ke Mitra Pembangunan.

Akuntabilitas pemanfaatan hibah tetap dapat dipertanggungjawabkan melalui audit yang dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Mitra Pembangunan berdasarkan perjanjian hibah (*Grant Agreement*).

Mekanisme pencairan hibah langsung luar negeri kas diatur dalam:

1. *General Guidelines* dari Mitra Pembangunan menetapkan bahwa seluruh ketentuan pelaksanaan hibah mengacu kepada *guideline*;
2. MoU Hibah antara Mitra Pembangunan dan Kementerian PPN/Bappenas menetapkan bahwa penyaluran dana hibah

langsung ke rekening yang disetujui oleh Mitra Pembangunan, bukan melalui rekening Kas Umum Negara.

Belanja Pegawai
Rp149.301.536.269,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp149.301.536.269,00 dan Rp169.235.794.623,00 atau terjadi penurunan sebesar 11,78 persen. Hal ini disebabkan adanya penurunan belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito karena tidak adanya pemberian tunjangan kinerja untuk gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) akibat pandemi Covid-19. Selain itu terdapat penurunan belanja lembur akibat pembatasan bekerja di kantor dampak dari akibat pandemi Covid-19.

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	64.080.963.023	64.118.386.479	(0,06)
Belanja Lembur	51.811.000	364.357.000	(85,78)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	85.260.345.698	104.779.139.445	(18,63)
Total Belanja Pegawai	149.393.119.721	169.261.882.924	(11,74)
Pengembalian Belanja Pegawai	(91.583.452)	(26.088.301)	251,05
Jumlah Belanja	149.301.536.269	169.235.794.623	(11,78)

Belanja Barang
Rp884.565.670.476,00

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp884.565.670.476,00 dan Rp1.129.733.334.979,00.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 mengalami penurunan 21,70 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan adanya kebijakan *work from home* (WFH) yang menyebabkan penurunan belanja barang non operasional dan mengurangi kebutuhan belanja barang persediaan. Selain itu, pembatasan perjalanan dinas pada masa pandemi Covid-19 mengakibatkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri jauh berkurang.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	58.164.479.647	46.177.642.935	25,96
Belanja Barang Non Operasional	200.679.890.030	250.689.064.504	(19,95)
Belanja Barang Pengganti Pajak	-	-	-
Belanja Barang Persediaan	13.852.937.240	17.221.563.967	(19,56)
Belanja Jasa	465.029.717.666	426.555.170.393	9,02
Belanja Pemeliharaan	18.554.808.800	17.281.445.104	7,37
Belanja Perjalanan Dinas	110.283.989.464	335.900.819.048	(67,17)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	4.112.012.652	35.755.458.953	(88,50)
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda		4.099.218.100	-
Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah (NonKas)	-	-	-
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	18.634.729.494	1.141.104.813	1.533,04
Total Belanja Barang	889.312.564.993	1.134.821.487.817	(21,63)
Pengembalian Belanja Barang	(4.746.894.517)	(5.088.152.838)	(6,71)
Jumlah Belanja	884.565.670.476	1.129.733.334.979	(21,70)

B.4.1 Belanja Barang Penanganan – Pandemi Covid-19

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas telah mengalokasikan anggaran belanja barang. Realisasi belanja barang penanganan pandemi Covid-19 per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.684.537.014,00 yang terdiri dari belanja barang operasional dan belanja barang non operasional.

Tabel 16 Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	% Realisasi Anggaran
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	6.355.549.000	5.891.011.352	92,69
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	2.623.982.000	1.793.700.142	68,36
Pengembalian	-	-	(174.480)	-
Jumlah Belanja Barang Operasional dan Non Operasional	-	8.979.531.000	7.684.537.014	85,58

B.4.2 Belanja Jasa Penanganan – Pandemi Covid-19

Realisasi belanja jasa penanganan pandemi Covid-19 per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.843.006.971,00. Realisasi belanja jasa ini digunakan untuk membayar jasa konsultan maupun honor narasumber selama pandemi Covid-19.

Tabel 17 Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	% Realisasi Anggaran
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	25.338.314.000	22.844.536.971	90,16
Pengembalian	-	-	(1.530.000)	-
Jumlah Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID 19	-	25.338.314.000	22.843.006.971	90,15

B.4.3 Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid-19

Realisasi belanja perjalanan dinas penanganan pandemi Covid-19 per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.067.050.000,00. Realisasi ini digunakan untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dilaksanakan selama masa pandemi.

Tabel 18 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	% Realisasi Belanja
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	3.261.330.000	3.067.650.000	94,06
Pengembalian	-	-	(600.000)	-
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID 19	-	3.261.330.000	3.067.050.000	94,04

Belanja Modal
Rp82.993.972.404,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp82.993.972.404,00 dan Rp281.229.565.563,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 70,49 persen dibanding realisasi per 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan adanya pemotongan anggaran pada Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas dan Satker Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk penanganan Pandemi Covid-19. Berbeda halnya dengan belanja modal gedung dan bangunan yang mengalami kenaikan karena adanya pekerjaan renovasi rumah dinas Menteri Jalan Widya Chandra.

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.300.311.336	174.861.560.569	(61,51)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.534.215.500	2.720.209.000	287,26
Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	5.203.320.568	103.699.620.994	(94,98)
Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah (Non Kas)	-	-	-
Total Belanja Modal	83.037.847.404	281.281.390.563	(70,48)
Pengembalian Belanja Modal	(43.875.000)	(51.825.000)	(15,34)
Jumlah Belanja	82.993.972.404	281.229.565.563	(70,49)

Belanja Modal
Tanah
Rp0,00

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp67.300.311.336,00

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp67.300.311.336,00 dan Rp174.861.560.569,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 61,51 persen dibanding realisasi per 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan adanya pemotongan anggaran pada Satker Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas, Satker Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk penanganan Pandemi Covid-19. Selain itu terdapat akun belanja modal peralatan dan mesin – penanganan Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang digunakan untuk pembelian peralatan terkait prosedur penanganan kesehatan Covid-19, seperti bilik disinfektan, *camera thermal*, dan pembelian *wastafel portable* untuk bagian luar gedung.

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.318.197.574	174.584.351.569	(62,59)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid	1.855.831.762	-	-
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	126.282.000	277.209.000	(54,45)
Jumlah Belanja Kotor	67.300.311.336	174.861.560.569	(61,51)
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Jumlah Belanja	67.300.311.336	174.861.560.569	(61,51)

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp10.490.340.500,00

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp10.490.340.500,00 dan Rp2.668.384.000,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 287,26 persen dibanding realisasi per 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan karena adanya pekerjaan renovasi di Gedung Taman Suropati seperti perbaikan ruang Menteri, garasi dan kanopi bus, pagar dan *smoking area*.

Tabel 21 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	10.534.215.500	2.720.209.000	287,26
Jumlah Belanja Kotor	10.534.215.500	2.720.209.000	287,26
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	(43.875.000)	(51.825.000)	(15,34)
Jumlah Belanja	10.490.340.500	2.668.384.000	287,26

Terdapat kesalahan penggunaan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) untuk pekerjaan renovasi rumah dinas Menteri Jalan Widya Chandra, yang seharusnya menggunakan akun belanja penambahan nilai aset tetap lainnya/aset lainnya tetapi dicatat sebagai belanja penambahan nilai Gedung dan bangunan.

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp0,00*

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Belanja Modal
Lainnya
Rp5.203.320.568,00*

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp5.203.320.568,00 dan Rp103.699.620.994,00.

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 94,98 persen dibanding realisasi per 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan adanya pekerjaan renovasi Gedung Wisma Bakrie 2 yang masih dalam status Bangun Guna Serah (BGS).

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	3.880.999.368	4.345.435.994	(10,69)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau aset	1.322.321.200	99.354.185.000	(98,67)
Jumlah Belanja Kotor	5.203.320.568	103.699.620.994	(94,98)
Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Jumlah Belanja	5.203.320.568	103.699.620.994	(94,98)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp77.254.593,00

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp77.254.593,00 dan Rp38.136.194,00. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	per 31 Desember 2020	per 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Kas di Bendahara Pengeluaran - UP	6.609.800	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	70.644.793	38.136.194	85,24
Jumlah	77.254.593	38.136.194	85,24

Selain itu, terdapat Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) sesuai dengan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan perincian pembagian sebagai berikut :

Tabel 24 Rincian Pembagian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) TA 2020

(Dalam Rupiah)

NO	SATKER	PPK	UP KKP (40%)
1	SATKER BAPPENAS	DM I	124.000.000
2		DM II	140.000.000
3		DM III & ICCTF	218.000.000
4		DM IV	76.000.000
5		DM V	50.000.000
6		DM VI	36.000.000
7		03.01 P2A2	104.000.000
8		06.01 PPN I	96.000.000
9		06.02 PPN II	86.000.000
10		06.03 PPN III	86.000.000
11		06.04 PPN IV	94.000.000
12		06.05 PPN V	108.000.000
13		06.06 PPN VI	100.000.000
14		06.07 PPN VII	116.000.000
15		06.08 PPN VIII	74.000.000
16		06.09 PPN IX	110.000.000
17		06.10 PPN X	140.000.000
18		06.11 PPN XI	72.000.000
19		06.12 PPN XII	110.000.000
20		PPK PPN XV (IKN)	30.000.000
21		PPK PPN XVI (Compact 2)	30.000.000
22	SATKER KNKS	KNKS	200.000.000
23	SATKER ICCTF	ICCTF	200.000.000
24	SATKER MCC	MCC	-
Total			Rp 2.400.000.000

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp638.208.958,00

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp638.208.958,00 dan Rp5.967.367.257,00. Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari kas lainnya di bendahara pengeluaran diluar UP/TUP, kas lainnya dari hibah sudah disahkan dan kas lainnya dari hibah belum disahkan. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	per 31 Desember 2020	per 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	331.398.721	1.736.498.862	(80,92)
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan			-
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	364.944.237	4.230.868.395	(91,37)
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	(58.134.000)		
Jumlah	638.208.958	5.967.367.257	(89,31)

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp638.208.958,00 merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp331.398.721,00 dan Kas Lainnya dari Hibah sebesar Rp306.810.237,00.

Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo pada Satker Bappenas dimana terdapat SSBP TAYL bulan Januari sampai dengan April 2021 sebesar Rp321.624.856,00 dan potongan pajak yang dibayarkan bulan Januari 2021 dari PPK DM IV sebesar Rp9.773.865,00.

Rincian Kas Lainnya dari Hibah merupakan saldo pada Satker Bappenas dimana terdapat penerimaan kas lainnya dari hibah sudah disahkan sebesar Rp364.944.237,00 yang berasal dari proyek UNICEF sebesar Rp180.859.085,00 dan Proyek READSI sebesar Rp184.085.152,00. Namun, terdapat belanja hibah yang belum disahkan sebesar Rp58.134.000,00 yang mengurangi saldo kas lainnya dari hibah menjadi sebesar Rp306.810.237,00.

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan pada lampiran 3.

Belanja Dibayar di Muka
Rp41.221.576.013,00

C.3. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp41.221.576.013,00 dan Rp43.207.682.176,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya dengan perbandingan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 Perbandingan Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Jenis	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Karyasiswa PHRD	30.174.856.072	38.053.477.967	(20,70)
Karyasiswa PHRD Premium	10.718.249.489	2.079.816.667	415,35
Karyasiswa Program Coremap	328.470.452	3.074.387.542	(89,32)
Jumlah	41.221.576.013	43.207.682.176	(4,60)

Data belanja dibayar di muka akan diperbaharui data secara tahunan sesuai aturan yang berlaku.

Saldo belanja dibayar dimuka berasal dari Karyasiswa di PPK PPN X, berikut rincian karyasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Belanja Dibayar di Muka Satker Bappenas

TAHUN	PROGRAM					
	PHRD	JUMLAH	COREMAP	JUMLAH	PREMIUM /SS/RM	JUMLAH
2017		8				
	S3LN	2				
	S3DN	6				
2018		3				
	S3LN	3				
2019		376				48
	S2LP	79			S2LP	48
	S2LN	2				
	S2DN	282				
	S3DN	13				
2020		297		14		30
	S2DN	280	S2LN	13	S2LP	20
	S2LP	17	S3LN	1	S2LP	7
					S3DN	3
	JUMLAH 1	684	JUMLAH 2	14	JUMLAH 3	78
TOTAL 1+2+3				776		

Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan pada lampiran 4.

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp502.342.500,00

C.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp502.342.500,00 dan Rp2.287.530,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Perbandingan Rincian Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	502.342.500	-	-
Satker MWA ICCTF	-	2.287.530	(100,00)
Jumlah	502.342.500	2.287.530	21.860,04

Saldo rincian pendapatan yang masih harus diterima berasal dari Satker Bappenas merupakan pembayaran penjualan kendaraan tanpa lelang Toyota Camry sebesar Rp426.000.000,00 dan pendapatan dari denda keterlambatan pekerjaan pengadaan Notebook TA 2020 di PPK DM V sebesar Rp76.342.500,00.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan pada lampiran 5.

Piutang Bukan
Pajak
Rp542.701.763,00

C.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp542.701.763,00 dan Rp0,00. Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Piutang PNBP	399.356.154	-	-
Piutang Lainnya	143.345.609	-	-
Jumlah	542.701.763	-	-

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Saldo Piutang Bukan Pajak berasal dari Piutang PNBP sebesar Rp399.356.154,00 merupakan Imbalan atas BOT Gedung Wisma Bakrie 2 dan Sewa Koperasi tanggal 16 Desember s/d 31 Desember 2020, Piutang Lainnya sebesar Rp143.345.609,00 merupakan Pengembalian sisa Bank Garansi PPK DM V dan DM III serta koreksi nilai pengadaan wastafel.

Untuk perlakuan Bank Garansi akhir tahun dalam Pengakuan Piutang Lainnya sebagaimana dijelaskan di atas dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya kriteria sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua dan PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yaitu telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Rincian Piutang Bukan Pajak dan perhitungannya disajikan pada lampiran 6 dan 7.

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Rp(2.628.360,00)*

C.6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp(2.628.360,00) dan Rp0,00. Perbandingan Rincian Penyisihan Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Perbandingan Rincian Penyisihan Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Piutang PNBP	1.996.781	-	-
Piutang Lainnya	631.579	-	-
Jumlah	2.628.360	-	-

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Kualitas	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	525.671.902	0,50%	2.628.360
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	525.671.902		2.628.360
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	525.671.902		2.628.360

Rincian Penyisihan Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak dan perhitungannya disajikan pada lampiran 6 dan 7.

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,00

C.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp51.805.080,00. Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebagai berikut:

Tabel 32 Perbandingan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	-	51.805.080	(100,00)
Jumlah	-	51.805.080	(100)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian TP/TGR disajikan pada lampiran 7.

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – BL
TGR/TGR
Rp(0,00)

C.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – BL TGR/TGR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – BL TGR/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp(0,00) dan Rp(259.025,00). Perbandingan rincian penyisihan piutang tidak tertagih BL/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BL TGR/TGR per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	-	259.025	(100,00)
Jumlah	-	259.025	(100,00)

Tabel 34 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-BL TGR/TGR per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Kualitas	Nilai Piutang Jangka Pendek	% Penyisihan	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Persediaan
Rp6.322.466.604,00

C.9. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar

Rp6.322.466.604,00 dan Rp88.524.541.338,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Perbandingan Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Barang Konsumsi	5.864.033.341	4.687.468.842	25,10
Barang untuk Pemeliharaan	214.739.672	166.435.625	29,02
Suku Cadang	32.868.924	33.435.914	(1,70)
Pita Cukai, Materai & Leges	-	1.225.000	(100,00)
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	-	8.597.374.046	(100,00)
Hewan dan Tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat	-	2.695.169.719	(100,00)
Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat	93.350.000	46.785.182.527	(99,80)
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada masyarakat	-	24.878.944.149	(100,00)
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat	-	442.853.200	(100,00)
Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
Bahan Baku	273.570	713.570	(61,66)
Persediaan Lainnya	117.201.097	235.738.746	(50,28)
Jumlah	6.322.466.604	88.524.541.338	(92,86)

Berikut penjelasan mutasi persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Mutasi Persediaan

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	88.524.541.338
Mutasi tambah :	
Pembelian	14.216.593.667
Hibah (Masuk)	270.000.000
Hasil Opname Fisik Lebih	70.596.611
Pencatatan Kembali Persediaan Tidak dikuasai TAB	3.305.979.119
Perolehan Lainnya	211.504.700
Reklas Masuk	446.887.000
Penyesuaian Harga	515.424.102
Mutasi Kurang :	
Koreksi Penyesuaian Persediaan	
Pemakaian	(14.664.377.441)
Penyerahan kepada Masyarakat atau Pemda Tugas Pembantuan	(82.640.367.181)
Barang Usang	(278.588.620)
Reklas Keluar	(3.649.717.369)
Penyesuaian Harga	(6.009.322)
Saldo per 31 Desember 2020	6.322.466.604

Saldo akhir tersebut merupakan penggabungan dari Laporan Barang Persediaan 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja, dan khusus untuk Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas menggunakan biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh melalui Aplikasi Persediaan dari 22 (dua puluh satu) Pejabat Pembuat Komitmen selaku

Pembantu Kuasa Pengguna Barang (sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan).

Satuan kerja yang masih memiliki saldo persediaan per 31 Desember 2020 yaitu:

Tabel 37 Saldo Persediaan pada Satuan Kerja

(Dalam Rupiah)

Satuan Kerja		Saldo
017312	Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas	6.322.148.604
220060	Bappeda Bali	318.000
Total		6.322.466.604

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 termasuk persediaan berupa tanah dan bangunan/hewan dan tanaman/peralatan dan mesin/jalan, irigasi dan jaringan/aset lain-lain yang akan diserahkan ke masyarakat yaitu Satuan Kerja Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas memiliki saldo persediaan berupa peralatan dan mesin untuk diserahkan senilai Rp93.350.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh rupiah). Per 31 Desember 2020 terdapat persediaan berupa peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke masyarakat pada Pengelola Hibah *Millenium Challenge Corporation* tidak disajikan dalam neraca karena sudah tidak berada dalam penguasaan dan dalam proses mendapatkan persetujuan pemindahtanganan dari Pengelola Barang sesuai PMK Nomor 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasal 47, yaitu Program *Compact* dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sedang dalam proses persetujuan presiden senilai Rp94.839.922.604,00 (sembilan puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat);
- b. Sedang dalam proses serah terima senilai Rp1.083.733.530,00 (satu milyar delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh).

Per 31 Desember 2020 terdapat persediaan berupa peralatan dan mesin yang akan diserahkan ke masyarakat pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas tidak disajikan dalam neraca karena sudah tidak berada dalam penguasaan dan dalam proses mendapatkan persetujuan pemindahtanganan dari Pengelola Barang sesuai PMK Nomor 181 /PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasal 47, yaitu:

- a. PGSP – UNDP sebesar Rp57.708.500,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus rupiah), sesuai surat permohonan persetujuan nomor 8015/SES/09/2017 tanggal 22 September 2017;
- b. JFPR – ADB sebesar Rp1.283.830.003,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga rupiah),sesuai surat permohonan persetujuan nomor 7446/B.05/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta I.
- c. ICBDA – USAID sebesar Rp250,431,000,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu), sesuai surat permohonan persetujuan nomor 05342/B.05/05/2020 tanggal 12 Mei 2020.

C.9.1 Barang Konsumsi

Nilai Barang Konsumsi per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp5.864.033.341,00 dan Rp4.687.468.842,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Mutasi Barang Konsumsi

(Dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	4.687.468.842
Mutasi tambah :	
Pembelian	13.547.567.346
Koreksi Penyesuaian Persediaan	514.021.972
Hibah (Masuk)	270.000.000
Hasil Opname Fisik Lebih	61.407.679
Pencatatan Kembali Persediaan Tidak dikuasai TAB	3.015.407.172
Perolehan Lainnya	134.176.900
Reklas Masuk	4.173.000
Mutasi Kurang :	
Koreksi Penyesuaian Persediaan	(3.115.550)
Pemakaian	(13.023.383.467)
Penyerahan kepada Masyarakat atau Pemda Tugas Pembantuan	(121.777.625)
Barang Usang	(278.588.620)
Reklas Keluar	(2.943.324.308)
Saldo per 31 Desember 2020	5.864.033.341

Mutasi tambah:

1. Pembelian → transaksi perolehan persediaan barang konsumsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi pada periode berjalan.
2. Koreksi Penyesuaian Persediaan → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi koreksi nilai dan/atau kuantitas persediaan barang konsumsi.
3. Hibah (Masuk) → transaksi perolehan persediaan barang konsumsi yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat.
4. Hasil Opname Fisik Lebih → transaksi yang digunakan untuk membukukan penambahan nilai persediaan barang konsumsi sebagai akibat pelaksanaan opname fisik barang.
5. Pencatatan Kembali Persediaan Tidak dikuasai TAB → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi pencatatan kembali persediaan tidak dikuasai TAB.
6. Perolehan Lainnya → transaksi perolehan yang tidak termasuk pada transaksi-transaksi perolehan di atas.
7. Reklasifikasi Masuk → transaksi pencatatan persediaan barang konsumsi yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi persediaan yang lain.

Mutasi kurang:

1. Koreksi Penyesuaian Persediaan → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi koreksi nilai dan/atau kuantitas persediaan barang konsumsi.
2. Pemakaian → transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan barang konsumsi pada periode berjalan.
3. Penyerahan kepada Masyarakat atau Pemda Tugas Pembantuan → transaksi pencatatan persediaan barang konsumsi yang diserahkan kepada masyarakat.

4. Barang Rusak/Usang → transaksi yang digunakan untuk menghapus persediaan barang konsumsi berupa barang cetakan dengan kondisi rusak/usang.
5. Reklasifikasi Keluar → transaksi yang digunakan untuk menghapus persediaan barang konsumsi untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru.

Berikut rincian untuk barang yang telah atau tidak dapat dimanfaatkan atau usang adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Barang Rusak/Usang

(Dalam Rupiah)
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	Tahun Pengadaan	SALDO AWAL		SUDAH TERDISTRIBUSI s/d TAHUN 2019 (Unit)	SALDO AKHIR	
			JUMLAH (unit)	RUPIAH		JUMLAH (unit)	RUPIAH
	BARANG CETAKAN			1.212.306.330			278.588.620
000047	Buku RPJMN dan Box TA 2014-2019	2015	181	76.414.580	104	77	32.507.860
000059	Buku Rencana Kerja Pemerinta (RKP) Tahun 2017	2016	500	155.760.000	432	68	21.183.360
000101	Buku Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018	2017	625	215.531.250	325	300	103.455.000
000131	Buku Lampiran Pidato TA 2018	2018	1215	316.750.500	1079	136	35.455.200
000172	Buku Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Th. 2019	2019	1250	447.850.000	1010	240	85.987.200

C.9.2 Bahan untuk Pemeliharaan

Nilai Bahan untuk Pemeliharaan per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp214.739.672,00 dan Rp166.435.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Mutasi Bahan untuk Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	166.435.625
Mutasi tambah :	
Pembelian	166.200.320
Koreksi Penyesuaian Persediaan	1.316.370
Hasil Opname Fisik Lebih	4.147.000
Pencatatan Kembali Persediaan Tidak dikuasai TAB	124.571.456
Perolehan Lainnya	65.282.800
Mutasi Kurang :	
Pemakaian	(258.152.399)
Reklas Keluar	(55.061.500)
Saldo per 31 Desember 2020	214.739.672

Mutasi tambah:

1. Pembelian → transaksi perolehan persediaan bahan untuk pemeliharaan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi pada periode berjalan.
2. Koreksi Penyesuaian Persediaan → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi koreksi nilai dan/atau kuantitas persediaan bahan untuk pemeliharaan.
3. Hasil Opname Fisik Lebih → transaksi yang digunakan untuk membukukan penambahan nilai persediaan bahan untuk pemeliharaan sebagai akibat pelaksanaan opname fisik barang.
4. Pencatatan Kembali Persediaan Tidak dikuasai TAB → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi pencatatan kembali persediaan tidak dikuasai TAB.
5. Perolehan Lainnya → transaksi perolehan yang tidak termasuk pada transaksi-transaksi perolehan di atas

Mutasi kurang:

1. Pemakaian → transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan bahan untuk pemeliharaan pada periode berjalan.
2. Reklasifikasi Keluar → transaksi yang digunakan untuk menghapus persediaan bahan untuk pemeliharaan untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru.

C.9.3 Suku Cadang

Nilai Suku Cadang per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp32.868.924,00 dan Rp33.435.914,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Mutasi Suku Cadang

(Dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	33.435.914
Mutasi tambah :	
Pembelian	16.236.000
Koreksi Penyesuaian Persediaan	55.000
Hasil Opname Fisik Lebih	5.041.932
Pencatatan Kembali Persediaan Tidak dikuasai TAB	2.640.000
Mutasi Kurang :	
Pemakaian	(24.539.922)
Saldo per 31 Desember 2020	32.868.924

Mutasi tambah:

1. Pembelian → transaksi perolehan persediaan suku cadang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi pada periode berjalan.
2. Koreksi Penyesuaian Persediaan → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi koreksi nilai dan/atau kuantitas persediaan suku cadang.
3. Hasil Opname Fisik Lebih → transaksi yang digunakan untuk membukukan penambahan nilai persediaan suku cadang sebagai akibat pelaksanaan opname fisik barang.
4. Pencatatan Kembali Persediaan Tidak dikuasai TAB → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi pencatatan kembali persediaan tidak dikuasai TAB.

Mutasi kurang:

1. Pemakaian → transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan suku cadang pada periode berjalan.

C.9.4 Pita Cukai, Materai dan Leges

Nilai Pita Cukai, Materai dan Leges per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.225.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42 Mutasi Pita Cukai, Materai dan Leges

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	1.225.000
Mutasi tambah :	
Pembelian	5.877.800
Mutasi Kurang :	
Reklas Keluar	(7.102.800)
Saldo per 31 Desember 2020	-

Mutasi tambah:

1. Pembelian → transaksi perolehan persediaan pita cukai, materai, dan leges yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi pada periode berjalan.

Mutasi kurang:

1. Reklasifikasi Keluar → transaksi yang digunakan untuk menghapus persediaan pita cukai, materai dan leges untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru.

C.9.5 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

Nilai Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp8.597.374.046,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43 Mutasi Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	8.597.374.046
Mutasi tambah :	
Mutasi Kurang :	
Penyerahan kepada Masyarakat	(8.597.374.046)
Saldo per 31 Desember 2020	-

Mutasi kurang:

1. Penyerahan kepada Masyarakat → transaksi pencatatan tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat yang diserahkan kepada masyarakat.

C.9.6 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

Nilai Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp2.695.169.719,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Mutasi Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	2.695.169.719
Mutasi tambah :	
Mutasi Kurang :	
Penyerahan kepada Masyarakat	(2.695.169.719)
Saldo per 31 Desember 2020	-

Mutasi kurang:

1. Penyerahan kepada Masyarakat → transaksi pencatatan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat yang diserahkan kepada masyarakat.

C.9.7 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

Nilai Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp93.350.000,00 dan Rp46.785.182.527,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Mutasi Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	46.785.182.527
Mutasi tambah :	
Pembelian	234.726.800
Pencatatan Kembali Persediaan Tidak dikuasai TAYL	93.350.000
Mutasi Kurang :	
Pemakaian	(717.302.685)
Penyerahan kepada Masyarakat atau Pemda Tugas Pembantuan	(188.911.800)
Reklas Keluar	(6.435.000)
Penyerahan kepada Masyarakat	(46.107.259.842)
Saldo per 31 Desember 2020	93.350.000

Mutasi tambah:

1. Pembelian → transaksi perolehan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat.
2. Pencatatan Kembali Persediaan Tidak dikuasai TAYL → Pencatatan transfer persediaan akibat kesalahan pencatatan dari modul aset ke modul persediaan.

Mutasi kurang:

1. Pemakaian → transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat pada periode berjalan.
2. Penyerahan kepada Masyarakat → transaksi peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat yang diserahkan kepada masyarakat.
3. Reklasifikasi Keluar → transaksi yang digunakan untuk menghapus peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru.

C.9.8 Aset Lain-lain untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

Nilai Aset Lain-lain untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp24.878.944.149,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46 Mutasi Aset Lain-lain untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	24.878.944.149
Mutasi tambah :	
Mutasi Kurang :	
Penyerahan kepada Masyarakat	(24.878.944.149)
Saldo per 31 Desember 2020	-

Mutasi kurang:

1. Penyerahan kepada Masyarakat → transaksi pencatatan aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat yang diserahkan kepada masyarakat.

C.9.9 Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

Nilai Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp442.853.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47 Mutasi Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	442.853.200
Mutasi tambah :	
Pembelian	86.603.201
Koreksi Penyesuaian Persediaan	30.760
Mutasi Kurang :	
Reklas Keluar	(478.557.161)
Penyerahan kepada Masyarakat atau Pemda Tugas Pembantuan	(50.930.000)
Saldo per 31 Desember 2020	-

Mutasi tambah:

1. Pembelian → transaksi perolehan barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat.
2. Koreksi Penyesuaian Persediaan → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi koreksi nilai dan/atau kuantitas barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Mutasi kurang:

1. Reklasifikasi Keluar → transaksi yang digunakan untuk menghapus barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru.
2. Penyerahan kepada Masyarakat → transaksi barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat yang diserahkan kepada masyarakat.

C.9.10 Bahan Baku

Nilai Bahan Baku per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp273.570,00 dan Rp713.570,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Mutasi Bahan Baku

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	713.570
Mutasi tambah :	
Pembelian	2.466.600
Perolehan Lainnya	12.045.000
Reklas Masuk	442.714.000
Mutasi Kurang :	
Pemakaian	(455.344.600)
Reklas Keluar	(2.321.000)
Saldo per 31 Desember 2020	273.570

Mutasi tambah:

1. Pembelian → transaksi perolehan persediaan bahan baku yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi pada periode berjalan.

2. Perolehan Lainnya → transaksi perolehan yang tidak termasuk pada transaksi-transaksi perolehan di atas.
3. Reklasifikasi Masuk → transaksi pencatatan persediaan bahan baku yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi persediaan yang lain.

Mutasi kurang:

1. Pemakaian → transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan bahan baku pada periode berjalan.
2. Reklasifikasi Keluar → transaksi yang digunakan untuk menghapus persediaan bahan baku untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru.

C.9.11 Persediaan Lainnya

Nilai Persediaan Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp117.201.097,00 dan Rp235.738.746,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49 Mutasi Persediaan Lainnya

(Dalam Rupiah)	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	235.738.746
Mutasi tambah :	
Pembelian	6.000.000
Pencatatan Kembali Persediaan Tidak dikuasai TAB	70.010.491
Mutasi Kurang :	
Reklas Keluar	(6.000.000)
Pemakaian	(185.654.368)
Koreksi Penyesuaian Persediaan	(2.893.772)
Saldo per 31 Desember 2020	117.201.097

Mutasi tambah:

1. Pembelian → transaksi perolehan persediaan bahan baku yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat dan Satuan Kerja Dekonsentrasi pada periode berjalan.
2. Pencatatan Kembali Persediaan Tidak dikuasai TAB → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi pencatatan kembali persediaan tidak dikuasai TAB.

Mutasi kurang:

1. Reklasifikasi Keluar → transaksi yang digunakan untuk menghapus persediaan lainnya untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan yang baru.

2. Pemakaian → transaksi yang digunakan untuk membukukan pemakaian/habis pakai persediaan lainnya pada periode berjalan.
3. Koreksi Penyesuaian Persediaan → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi koreksi nilai dan/atau kuantitas persediaan lainnya.

Rincian Persediaan disajikan pada lampiran 8.

C.10. Tanah

Tanah
Rp1.541.450.676.000,00

Tanah yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.541.450.676.000,00 dan Rp1.484.443.750.305,00. Berikut tabel perbandingan aset tetap tanah tahun 2020 dan tahun 2019:

Tabel 50 Perbandingan tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	1.541.450.676.000	1.484.443.750.305	3,84
Jumlah	1.541.450.676.000	1.484.443.750.305	3,84

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Tabel 51 Mutasi Aset Tetap Berupa Tanah

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	1.484.443.750.305
Mutasi tambah :	
Koreksi Penilaian Kembali BMN	57.006.925.695
	-
Mutasi Kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2020	1.541.450.676.000

Mutasi tambah:

1. Koreksi Penilaian Kembali BMN → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan nilai/ kuantitas tanah dikarenakan adanya perubahan nilai/ kuantitas akibat pelaksanaan penilaian oleh Tim Penertiban tanah. Adapun koreksi penilaian kembali BMN tersebut merupakan koreksi penambahan nilai hasil revaluasi pada Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II NUP 13 yang berlokasi di Kelurahan Jati Sari Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi seluas 12.000 m2.

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 52 Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)

NO	LUAS (M2)		NAMA BARANG	NOMOR ASET	NILAI	LOKASI
	HASIL INVENTARIS	SAKTI				
1	12.000	11.943	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	13	58.011.750.000	Jati Sari, Bekasi
2	203	135	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	2.135.019.000	Buncit PLK XI, Jakarta Selatan
3	172	70	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2	1.073.111.000	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan
4	160	160	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	8	401.508.000	Sawangan, Depok
5	28.172	28.172	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4	134.318.726.000	Jati Sampurna, Bekasi
6	208	306	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	12	764.787.000	Sawangan, Depok
7	160	160	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	10	401.508.000	Sawangan, Depok
8	160	160	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	9	401.508.000	Sawangan, Depok
9	140	140	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	11	351.319.000	Sawangan, Depok
10	2.035	2.205	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	6	10.077.234.000	Jati Sampurna, Bekasi
11	27.022	27.022	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3	125.785.408.000	Jati Sari, Bekasi
12	523	523	Tanah Bangunan Gudang	1	10.019.755.000	Tawakal Ujung Grogol, Jakarta, Barat
13	2.334	2.334	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	216.186.750.000	Madiun No.4-6, Jakarta Pusat
14	846	846	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	78.380.843.000	Sunda Kelapa No.9, Jakarta Pusat
15	726	726	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	43.630.422.000	Proklamasi No.70, Jakarta Pusat
16	678	678	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9	62.783.648.000	Madiun No.2, Jakarta Pusat
17	2.905	2.905	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	267.764.744.000	Taman Suropati No.2A, Jakarta Pusat
18	4.218	4.218	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	390.692.250.000	Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat
19	1.437	1.437	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6	134.433.146.000	Taman Suropati No.1, Jakarta Pusat
20	-	255	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1	3.837.240.000	Siaga Krobokan, Jakarta Selatan
TOTAL					1.541.450.676.000	

Per 31 Desember 2020 pada Kementerian PPN/Bappenas terdapat aset tetap berupa tanah dengan status Hak Pakai yang lokasinya berada di Jatisari dan Jatisampurna yang telah dimanfaatkan untuk perumahan pegawai dan sedang dalam proses permintaan persetujuan pemindahtanganan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Pengelola Barang/Menteri Keuangan.

Terhadap status tanah di Jatisari dan Jatisampurna tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah menyampaikan surat kepada Kementerian Keuangan namun belum mendapatkan tanggapan.

Adapun surat yang dimaksud yaitu:

- a. Surat dari Menteri PPN/Bappenas kepada Menteri Keuangan Nomor B.446/M.PPN/SES/PL.08/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 hal usulan pemindahtanganan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Surat dari Kepala Biro Umum kepada Menteri Keuangan Nomor 2681/B.05/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 hal permohonan penetapan status dan penyampaian kelengkapan dokumen pemindahtanganan tanah kavling Jatisari dan Jatisampurna; dan
- c. Surat dari Kepala Biro Umum kepada Menteri Keuangan Nomor 6729/B.05/07/2018 tanggal 4 Juli 2018 hal penyampaian kelengkapan dokumen pemindahtanganan tanah kavling Jatisari dan Jatisampurna.

Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 disajikan pada lampiran 9.

Peralatan dan Mesin
Rp469.890.509.737,00

C.11. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp469.890.509.737,00 dan Rp433.773.685.330,00. Perbandingan Rincian Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 53 Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	465.635.328.876	393.484.579.994	18,34
Satker MWA ICCTF	4.255.180.861	4.040.516.005	5,31
Satker MCC		31.815.925.523	(100,00)
Satker KNKS	-	4.432.663.808	(100,00)
Jumlah	469.890.509.737	433.773.685.330	8,33

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 54 Mutasi Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	433.773.685.330
Mutasi tambah:	
Pembelian	46.649.597.485
Pengembangan Nilai Aset	14.735.018.500
Input Perolehan BMN Oleh Tim Pengembang Aplikasi	361.619.425
Reklasifikasi Masuk	3.613.564.013
Perolehan Lainnya	439.277.945
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	2.939.758.276
Transfer Masuk	10.957.113.714
Hibah (Masuk)	428.677.024
Pembatalan Penghapusan	171.500.000
Mutasi kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(4.145.711.307)
Transfer Keluar	(36.248.589.331)
Reklasifikasi Keluar	(3.646.236.712)
Koreksi Pencatatan	(43.467.625)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(93.350.000)
Penghapusan Reklasifikasi dari Intra Ke Ektra	(1.947.000)
Saldo per 31 Desember 2020	469.890.509.737
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	(285.218.172.126)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	184.672.337.611

Penghapusan brankas dilakukan pada tahun 2020, namun sudah dilakukan usul hapus pada tahun 2019 sehingga tidak muncul jurnal dan telah mengurangi nilai neraca di tahun 2019 (rusak berat).

Mutasi tambah:

1. Pembelian → transaksi perolehan peralatan dan mesin yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satker MCC, Satker ICCTF, Satker Komite Nasional Keuangan Syariah dan Satker Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas pada periode berjalan;
2. Pengembangan nilai aset → transaksi yang digunakan untuk membukukan penambahan nilai peralatan dan mesin sebagai akibat pelaksanaan renovasi atau restorasi yang memenuhi kapitalisasi aset yang dananya berasal dari APBN tahun berjalan;
3. Input Perolehan BMN Oleh Tim Pengembang Aplikasi → pencatatan perolehan BMN yang dilakukan oleh Tim Pengembang Aplikasi;
4. Reklasifikasi Masuk → transaksi pencatatan peralatan dan mesin yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain;

5. Perolehan Lainnya → transaksi perolehan yang tidak termasuk pada transaksi-transaksi perolehan di atas, dan perolehan atas Koreksi BPK untuk pembelian Printer *ID Card*.
6. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan nilai dan / atau kuantitas barang dikarenakan adanya kesalahan Pembukuan pada nilai / kuantitas;
7. Transfer Masuk → transaksi perolehan peralatan dan mesin dari Kuasa Pengguna Barang lain dalam lingkungan Pemerintah Pusat. Adapun transfer masuk tersebut berasal dari Satuan kerja Pengelola Hibah *Millenium Challenge Corporation* dan Satuan kerja Komite Nasional Keuangan Syariah.
8. Hibah (Masuk) → transaksi perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat;
9. Pembatalan Penghapusan → pencatatan peralatan dan mesin dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/dikeluarkan dari pembukuan berdasarkan Keputusan Penghapusan;

Mutasi Kurang:

1. Penghentian Aset dari Penggunaan → transaksi untuk mereklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dari akun Aset Tetap ke dalam akun Aset Lainnya sebagai aset lain-lain;
2. Transfer Keluar → transaksi yang digunakan untuk menghapus peralatan dan mesin sebagai akibat dari penyerahan peralatan dan mesin ke Kuasa Pengguna Barang lain. Adapun rincian transaksi transfer keluar yaitu Alih status dari Satuan Kerja Pengelola Hibah *Millenium Challenge Corporation* kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas, dan Alih status dari Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah kepada Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas;

3. Reklasifikasi Keluar → transaksi yang digunakan untuk menghapus peralatan dan mesin untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru;
4. Koreksi Pencatatan → transaksi yang digunakan untuk menghapus peralatan dan mesin sebagai akibat dari perbaikan atas kesalahan pembukuan berupa kelebihan kuantitas barang dan/atau kesalahan pencatatan;
5. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan → transaksi yang digunakan untuk menghapus peralatan dan mesin untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi persediaan;
6. Penghapusan Reklasifikasi dari Intra Ke Ekstra → transaksi penghapusan peralatan dan mesin yang sebelumnya dicatat sebagai aset intrakomtable menjadi aset ekstrakomtable (dibawah kapitalisasi);

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2020 disajikan pada lampiran 9.

Gedung dan
Bangunan
Rp159.920.519.326,00

C.12. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp159.920.519.326,00 dan Rp157.938.995.269,00. Perbandingan rincian Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 55 Perbandingan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	159.920.519.326	157.938.995.269	1,25
Jumlah	159.920.519.326	157.938.995.269	1,25

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 56 Mutasi Transaksi Terhadap Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	157.938.995.269
Mutasi tambah :	
Pembelian	228.657.310
Pengembangan Nilai Aset	1.752.866.747
Mutasi kurang :	
Saldo per 31 Desember 2020	159.920.519.326
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	26.635.326.428
Nilai Buku per 31 Desember 2020	133.285.192.898

Mutasi tambah:

1. Pembelian → transaksi perolehan gedung dan bangunan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas pada periode berjalan;
2. Pengembangan Nilai Aset → transaksi pengembangan (rehabilitasi/renovasi/restorasi) gedung dan bangunan yang memenuhi kapitalisasi aset yang dananya berasal dari APBN tahun berjalan.

Mutasi kurang:

1. Tidak ada mutasi kurang untuk aset Gedung dan Bangunan.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 9.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp6.020.002.566,00

C.13. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.020.002.566,00 dan Rp6.020.002.566,00 dengan perbandingan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Perbandingan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	6.020.002.566	6.020.002.566	-
Jumlah	6.020.002.566	6.020.002.566	-

Tabel 58 Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	6.020.002.566
Mutasi tambah :	-
	-
Mutasi kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2020	6.020.002.566
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	3.302.790.802
Nilai Buku per 31 Desember 2020	2.717.211.764

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset Jalan, Irigasi, Jaringan pada Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 31 Desember 2020.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 9.

Aset Tetap Lainnya
Rp111.114.920.719,00

C.14. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp111.114.920.719,00 dan Rp101.395.867.321,00. Perbandingan rincian aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 59 Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	111.029.235.369	101.161.328.303	9,75
Satker MWA ICCTF	85.685.350	85.685.350	-
Satker KNKS	-	148.853.668	(100,00)
Jumlah	111.114.920.719	101.395.867.321	9,59

Tabel 60 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Buku
1	Aset Tetap Renovasi	106.950.597.934
2	Aset Tetap Lainnya	4.164.322.785
	Jumlah	111.114.920.719

Tabel 61 Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	101.395.867.321
Mutasi tambah	
Pembelian	47.595.000
Hibah (Masuk)	11.000.000
Reklasifikasi Masuk	47.595.000
Transfer Masuk	148.853.668
Pengembangan nilai aset	9.662.705.653
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Lainnya	17.117.606
Mutasi kurang	
Transfer Keluar	(148.853.668)
Reklasifikasi Keluar	(47.595.000)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(17.029.861)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(2.335.000)
Saldo per 31 Desember 2020	111.114.920.719

Mutasi tambah:

1. Pembelian → transaksi perolehan aset tetap lainnya yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja ICCTF dan Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas pada periode berjalan;

2. Hibah (Masuk) → transaksi perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat;
3. Reklasifikasi Masuk → transaksi pencatatan aset tetap lainnya yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain;
4. Transfer Masuk →
 - Aset Tetap Dalam Renovasi: transaksi pencatatan perolehan aset tetap dalam renovasi dari Kuasa Pengguna Barang lain dalam lingkungan Pemerintah Pusat. Adapun transfer masuk tersebut berasal dari Satuan kerja Komite Nasional Keuangan Syariah.
 - Aset tetap lainnya: transaksi perolehan aset tetap lainnya dari Kuasa Pengguna Barang lain dalam lingkungan Pemerintah Pusat. Adapun transfer masuk tersebut berasal dari Satuan kerja Komite Nasional Keuangan Syariah;
5. Pengembangan Nilai Aset → transaksi pengembangan (rehabilitasi/renovasi/restorasi) aset tetap dalam renovasi yang menambah nilai buku sebelumnya berupa rumah dinas Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jalan Widya Chandra dan pekerjaan penataan ruang kerja Kementerian PPN/Bappenas di gedung sewa.
6. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Lainnya → transaksi pencatatan aset tetap lainnya akibat penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya.

Mutasi kurang:

1. Transfer Keluar →
 - Untuk aset tetap dalam renovasi: transaksi pencatatan perolehan aset tetap dalam renovasi dari Kuasa Pengguna Barang lain dalam lingkungan Pemerintah Pusat. Adapun transfer masuk tersebut berasal dari Satuan kerja Komite Nasional Keuangan Syariah;
 - Untuk aset tetap lainnya: transaksi yang digunakan untuk menghapus aset tetap lainnya sebagai akibat dari penyerahan peralatan dan mesin ke Kuasa Pengguna Barang lain. Adapun rincian transfer keluar yaitu alih status dari Satuan kerja Komite

Nasional Keuangan Syariah kepada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas;

2. Reklasifikasi Keluar → transaksi yang digunakan untuk menghapus aset tetap lainnya untuk dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru;
3. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan nilai dan/atau kuantitas aset tetap dalam renovasi dikarenakan adanya ke salahan pembukuan pada nilai/kuantitas;
4. Penghentian Aset dari Penggunaan → transaksi untuk mereklasifikasi aset tetap lainnya yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dari akun Aset Tetap Lainnya ke dalam akun Aset Lainnya sebagai aset lain-lain.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada lampiran 9.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
(KDP)
Rp0,00*

C.15. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Perbandingan rincian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah sebagai berikut:

Tabel 62 Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 31 Desember 2020.

Rincian lebih lanjut terkait Kontruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran 9.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp315.156.289.356,00

C.16. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp315.156.289.356,00 dan Rp258.202.199.382,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020.

Tabel 63 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	1.541.450.676.000	-	1.541.450.676.000
2	Peralatan dan Mesin	469.851.129.737	(285.218.172.126)	184.632.957.611
3	Gedung dan Bangunan	159.920.519.326	(26.635.326.428)	133.285.192.898
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.020.002.566	(3.302.790.802)	2.717.211.764
5	Aset Tetap Lainnya	4.149.540.179	-	4.149.540.179
6	Aset Tetap Renovasi	106.821.777.795	-	106.821.777.795
7	Konstruksi Dalam pengerjaan	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	2.288.213.645.603	(315.156.289.356)	1.973.057.356.247

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran 9.

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp0,00

C.17. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp(0,00)

C.18. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp(0,00) dan Rp(0,00).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Rp490.209.375.000,00

C.19. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp490.209.375.000,00 dan Rp490.209.375.000,00. Perbandingan Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 64 Perbandingan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	490.209.375.000	490.209.375.000	-
Jumlah	490.209.375.000	490.209.375.000	-

Tidak terdapat peningkatan saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.

Aset Tak Berwujud
Rp131.912.902.018,00

C.20. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp131.912.902.018,00 dan Rp55.783.312.439,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65 Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	127.875.140.511	44.908.405.328	184,75
Satker MCC	-	6.871.564.604	(100,00)
Satker MWA ICCTF	4.037.761.507	4.003.342.507	0,86
Jumlah	131.912.902.018	55.783.312.439	136,47

Tabel 66 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Buku
1	Software	52.692.227.167
2	Lisensi	9.221.030.851
3	Hasil Kajian/Penelitian	69.999.644.000
	Jumlah	131.912.902.018

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutasi aset Tak Berwujud pada Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut :

Tabel 67 Mutasi Saldo Aset Tak Berwujud

(Dalam Rupiah)	
Saldo per 31 Desember 2019	55.783.312.439
Mutasi tambah	
Pengembangan Nilai Aset	1.644.000.000
Pembelian	7.605.880.784
Reklasifikasi Masuk	32.672.699
Hibah (Masuk)	176.622.500
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.462.116.881
Transfer Masuk	6.853.857.320
Perolehan Lainnya	69.999.644.000
Mutasi keluar	
Transfer Keluar	(6.853.857.320)
Koreksi Pencatatan	(4.791.347.285)
Saldo per 31 Desember 2020	131.912.902.018
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2020	(43.687.324.117)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	88.225.577.901

Mutasi tambah:

1. Pengembangan Nilai Aset → transaksi yang digunakan untuk membukukan penambahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat pelaksanaan renovasi atau restorasi yang memenuhi kapitalisasi aset yang dananya berasal dari APBN tahun berjalan;
2. Pembelian → transaksi perolehan Aset Tak Berwujud yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN melalui Satuan Kerja ICCTF, dan Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas pada periode berjalan;
3. Reklasifikasi Masuk → transaksi pencatatan aset tak berwujud yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain;
4. Hibah (Masuk) → transaksi perolehan aset tak berwujud yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis dari luar Pemerintah Pusat;
5. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas → transaksi yang digunakan untuk membukukan transaksi perubahan nilai dan/atau kuantitas aset tak berwujud dikarenakan adanya ke salah pembukuan pada nilai / kuantitas.
6. Transfer Masuk → transaksi perolehan aset tak berwujud dari Kuasa Pengguna Barang lain dalam lingkungan Pemerintah Pusat. Adapun transfer masuk tersebut berasal dari Satuan kerja Pengelola Hibah *Millenium Challenge Corporation*;
7. Perolehan Lainnya → transaksi perolehan yang tidak termasuk pada transaksi-transaksi perolehan di atas.

Mutasi Kurang :

1. Transfer Keluar → transaksi yang digunakan untuk menghapus peralatan dan mesin sebagai akibat dari penyerahan peralatan dan mesin ke Kuasa Pengguna Barang lain. Adapun rincian transaksi transfer keluar yaitu Alih status dari Satuan Kerja Pengelola Hibah *Millenium Challenge Corporation* kepada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian PPN/Bappenas.
2. Koreksi Pencatatan → transaksi yang digunakan untuk menghapus aset tak berwujud sebagai akibat dari perbaikan atas kesalahan pembukuan berupa kelebihan kuantitas barang dan/atau kesalahan pencatatan;

Rincian Aset Tetap Tak Berwujud disajikan pada lampiran 9.

Aset Tak Berwujud
dalam Pengerjaan
Rp0,00

C.21. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Terdapat mutasi tambah aset tak berwujud dalam pengerjaan Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan 31 Desember 2020. Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan.

Rincian Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan disajikan pada lampiran 9.

Aset Lain-Lain
Rp66.639.026.947,00

C.22. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp66.639.026.947,00 dan Rp68.180.544.422,00. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian PPN/Bappenas serta dalam proses penghapusan dari BMN. Perbandingan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 68 Perbandingan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	66.639.026.947	68.180.544.422	(2,26)
Jumlah	66.639.026.947	68.180.544.422	(2,26)

Tabel 69 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	66.639.026.947
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-
	Jumlah	66.639.026.947

Adapun mutasi aset lainnya yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 70 Mutasi Aset Lain-lain

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	68.180.544.422
Mutasi tambah	-
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	4.148.046.307
Mutasi kurang	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(5.562.634.728)
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Lainnya	(17.117.606)
Pencatatan Barang yang akan dihapuskan	(109.811.448)
Saldo per 31 Desember 2020	66.639.026.947
Akumulasi Penyusutan	(6.310.727.678)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	60.328.299.269

Mutasi tambah:

1. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya → transaksi atas perubahan kondisi ke rusak berat.

Mutasi kurang:

1. Penghapusan (BMN yang dihentikan) → transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN yang sebelumnya telah dihentikan penggunaannya sebagai akibat dari pengalihan kepada pihak lain berdasarkan suatu Keputusan Penghapusan.
2. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Lainnya → transaksi pencatatan akibat penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya.
3. Pencatatan Barang yang akan dihapuskan → transaksi yang digunakan untuk mencatat BMN yang akan dihapuskan.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran 9 dan 10.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp49.998.051.795,00

C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp49.998.051.795,00 dan Rp42.802.462.277,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 71 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software	52.692.227.167	(40.593.464.827)	12.098.762.340
2	Lisensi	9.221.030.851	(3.093.859.290)	6.127.171.561
3	Hasil Kajian/Penelitian	69.999.644.000	-	69.999.644.000
	Jumlah	131.912.902.018	(43.687.324.117)	88.225.577.901
B	Aset Lainnya			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	66.639.026.947	(6.310.727.678)	60.328.299.269
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-
	Jumlah	66.639.026.947	(6.310.727.678)	60.328.299.269

Rincian akumulasi amortisasi aset tak berwujud disajikan pada lampiran 9.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp2.107.379.659,00

C.24. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.107.379.659,00 dan Rp4.546.685.157,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Perbandingan rincian utang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 72 Perbandingan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	2.050.044.348	2.271.235.291	(9,74)
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	57.335.311	2.275.449.866	(97,48)
Jumlah	2.107.379.659,00	4.546.685.157,00	(53,65)

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan pada lampiran 11.

Utang yang belum ditagihkan Rp0,00

C.25. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan Utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan hutang ini dicatat oleh satker dengan dokumen sumber BAST.

Hibah Belum Disahkan Rp0,00

C.26. Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian saldo hibah langsung yang belum disahkan dapat dilihat pada lampiran 3.

Pendapatan Diterima di Muka Rp82.513.583,00

C.27. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp82.513.583,00 dan Rp197.392.416,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNPB yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Perbandingan Pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut:

Tabel 73 Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	82.513.583	197.392.416	(58,20)
Jumlah	82.513.583	197.392.416	(58,20)

Rincian Pendapatan Diterima di Muka disajikan pada lampiran 12.

Uang Muka dari KPPN Rp77.254.593,00

C.28. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp77.254.593,00 Rp38.136.194,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Perbandingan Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Tabel 74 Perbandingan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	70.644.793	38.136.194	85,24
Bappeda Propinsi Kalimantan Timur	6.609.800	-	-
Jumlah	77.254.593	38.136.194	85,24

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp9.773.865,00

C.29. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp9.773.865,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan dan utang jangka pendek lainnya. Utang jangka pendek lainnya berasal dari potongan pajak yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2020. Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 75 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Satker Bappenas	9.773.865	-	-
Jumlah	9.773.865	-	-

Ekuitas
Rp2.659.028.591.533,00

C.30. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.659.028.591.533,00 dan Rp2.629.750.217.776,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak (PNBP)
Lainnya Rp
611.470.187,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya

Jumlah Pendapatan pada Kementerian PPN/Bappenas untuk periode yang berakhir pada tanggal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dan adalah masing-masing sebesar Rp611.470.187,00 dan Rp526.895.890,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 76 Perbandingan Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	534.787.687	135.423.365	294,90
Pendapatan dari Bangun, Guna dan Serah (BGS)	-	360.047.373	
<i>Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN</i>	534.787.687	495.470.738	7,94
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	10.802	(100,00)
<i>Jumlah Pendapatan Jasa</i>	-	10.802	(100,00)
Pekerjaan Pemerintah	76.342.500	1.414.000	
Pendapatan Denda Lainnya		30.000.000	
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	
<i>Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya</i>	611.130.187	526.895.540	15,99
Pendapatan Anggaran Lain-lain	340.000	350	97.042,86
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	
Jumlah	611.470.187	526.895.890	16,051

Kenaikan pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2020 disebabkan karena terdapat denda keterlambatan penyelesaian pengadaan *Notebook* dan peningkatan pendapatan dari BOT Gedung Bakrie.

Tabel 77 Perbandingan PNBP Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2020

Uraian Jenis Pendapatan	PNBP Lainnya-LO (Rp)	PNBP Lainnya-LRA (Rp)	Selisih
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	534.787.687	20.552.700	514.234.987
Pendapatan dari Bangun, Guna dan Serah (BGS)	-	-	-
<i>Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan</i>	534.787.687	20.552.700	514.234.987
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	2.287.530	(2.287.530,00)
<i>Jumlah Pendapatan Jasa</i>	-	2.287.530	(2.287.530,00)
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	76.342.500	-	76.342.500
Pendapatan Denda Lainnya	-	-	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
<i>Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya</i>	611.130.187	22.840.230	588.289.957
Pendapatan Anggaran Lain-lain	340.000	340.000	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	
Jumlah	611.470.187	23.180.230	588.289.957

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 78 Selisih nilai PNBP Lainnya pada LO dan LRA
per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Saldo PNBP Lainnya - LRA		23.180.230
Penambah		
Pengakuan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	514.234.987	
Pengakuan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	76.342.500	
Jumlah Penambah	590.577.487	
Pengurang		
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan	2.287.530	
Jumlah Pengurang	2.287.530	
Total Tambah/Kurang		588.289.957
Saldo PNBP - LO		611.470.187

Beban Pegawai
Rp149.074.878.526,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp149.074.878.526,00 dan Rp161.031.193.376,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 79 Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	42.671.879.550	43.845.986.960	(2,68)
Beban Pembulatan Gaji	597.288	644.426	(7,31)
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	3.317.639.068	3.441.266.508	(3,59)
Beban Tunjangan Anak PNS	724.997.924	786.536.047	(7,82)
Beban Tunjangan Struktural	5.656.375.000	5.857.650.000	(3,44)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	2.846.570.000	2.781.965.000	2,32
Beban Tunjangan PPh PNS	456.436.963	512.164.857	(10,88)
Beban Tunjangan Beras PNS	1.838.164.440	1.921.012.920	(4,31)
Beban Uang Makan PNS	5.881.257.000	4.365.800.000	34,71
Beban Tunjangan Umum	617.770.000	688.590.000	(10,28)
Beban Uang Lembur	51.811.000	362.684.050	(85,71)
Beban Pegawai TK/Kegiatan	85.102.963.745	96.492.980.909	(11,80)
Jumlah Beban Pegawai	149.166.461.978	161.057.281.677	(7,38)
Pengembalian	(91.583.452)	(26.088.301)	251,05
Jumlah	149.074.878.526	161.031.193.376	(7,425)

Penurunan beban pegawai TA 2020 dibandingkan dengan TA 2019 utamanya disebabkan karena penurunan beban uang lembur dan tidak terealisasinya anggaran tunjangan kinerja pegawai 13 dan tunjangan kinerja THR.

Tabel 80 Perbandingan Beban Pegawai pada LO dan LRA per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	42.671.879.550	42.712.291.050	(40.411.500)
Beban Pembulatan Gaji	597.288	602.578	(5.290)
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	3.317.639.068	3.321.075.208	(3.436.140)
Beban Tunjangan Anak PNS	724.997.924	725.974.304	(976.380)
Beban Tunjangan Struktural	5.656.375.000	5.665.520.000	(9.145.000)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	2.846.570.000	2.860.180.000	(13.610.000)
Beban Tunjangan PPh PNS	456.436.963	457.743.443	(1.306.480)
Beban Tunjangan Beras PNS	1.838.164.440	1.838.164.440	-
Beban Uang Makan PNS	5.881.257.000	5.881.257.000	-
Beban Tunjangan Umum	617.770.000	618.155.000	(385.000)
Beban Uang Lembur	51.811.000	51.811.000	-
Beban Pegawai TK/Kegiatan	85.102.963.745	85.260.345.698	(157.381.953)
Jumlah Beban Pegawai	149.166.461.978	149.393.119.721	(226.657.743)
Pengembalian	(91.583.452)	(91.583.452)	-
Jumlah	149.074.878.526	149.301.536.269	(226.657.743)

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 81 Selisih Nilai Beban Pegawai pada LO dan LRA
per 31 Desember 2020

			(Dalam Rupiah)
			149.301.536.269
			149.301.536.269
	Saldo Belanja Pegawai - LRA		
	Pengurang		
Jurnal Balik Pembayaran Kekurangan Gaji Pokok Bulan Januari 2020, Akrual 2020 Bank BNI Syariah dan Kekurangan Bulan Jan-Maret serta Jurnal Temuan BPK Audited	Beban Gaji Pokok PNS	52.786.200	
Jurnal Balik Pembayaran Kekurangan Pembulatan Gaji Akrual Jan 2020 Bank BNI Syariah dan Konvensional dan Kekurangan Gaji Jan-Mart 2019 serta Jurnal Temuan BPK Audited	Beban Pembulatan Gaji	7.373	
Jurnal Balik Pembayaran Kekurangan Tj Suami Istri Akrual Jan 2020 Bank BNI Syariah dan Kekurangan Gaji Jan-Mart 2019 serta Jurnal Temuan BPK Audited	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	4.406.640	
Jurnal Balik Pembayaran Kekurangan Tj Anak PNS Akrual Jan 2020 Bank BNI Syariah dan Gaji Jan-Mart 2019 serta Jurnal Temuan BPK Audited	Beban Tunjangan Anak PNS	1.166.466	
Jurnal Balik Pembayaran Kekurangan Tunjangan Jabatan Struktural November 2019 serta Jurnal Temuan BPK Audited	Beban Tunj. Struktural PNS	9.145.000	
Jurnal Balik Pembayaran Kekurangan Tunjangan Jabatan Fungsional Bulan November 2019 Akrual Januari 2020 dan Kekurangan Jan-Mar 2019 serta Jurnal Temuan BPK Audited	Beban Tunj. Fungsional PNS	19.280.000	
Jurnal Balik Pembayaran Kekurangan Tunjangan PPh PNS Bulan November 2019 Akrual Januari 2020 dan Kekurangan Jan-Mar 2019 serta Jurnal Temuan BPK Audited	Beban Tunjangan PPh PNS	1.570.360	
Jurnal Balik Pembayaran Kekurangan Tunjangan Umum PNS Bulan November 2019 Akrual Januari 2020 dan Kekurangan Jan-Mar 2019 serta Jurnal Temuan BPK Audited	Beban Tunjangan Umum PNS	385.000	
Jurnal Balik Pengakuan Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) Periode 20 Desember - 31 Desember 2020 serta	Beban Tunjangan Khusus/Kegiatan	6.128.214.615	
	Jumlah Penambah	6.216.961.654	
	Penambah		
Pengakuan Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Periode 20 Desember-31 Desember 2020	Beban Tunjangan Khusus/Kegiatan	5.970.832.662	
Jurnal Pembayaran Kekurangan Gaji Pokok Konven dan Syariah	Beban Gaji Pokok	12.324.700	
Pembayaran Kekurangan Pembulatan Gaji Konven dan Syariah	Beban Pembulatan Gaji	2.083	
Pembayaran Kekurangan Tunjangan Suami/Istri PNS Konvensional dan Syariah	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	970.500	
Pembayaran Kekurangan Tunjangan Anak PNS Konvensional dan Syariah	Beban Tunjangan Anak PNS	190.086	
Pembayaran Kekurangan Tunjangan Fungsional Konvensional dan Syariah	Beban Tunj. Fungsional PNS	5.670.000	
Pembayaran Kekurangan Tunjangan PP PNS Konvensional dan Syariah	Beban Tunjangan PPh PNS	263.880	
	Jumlah Pengurang	5.990.253.911	
	Total Tambah/Kurang		(226.707.743)
	Saldo Beban Persediaan - LO		149.074.828.526

Beban Persediaan
Rp13.584.409.156,00

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.584.409.156,00 dan Rp18.275.935.263,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 82 Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	12.943.410.188	16.284.021.065	(20,51)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges		1.050.000	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Baku	455.344.600	351.245.380	29,64
Beban Persediaan Lainnya	185.654.368	1.639.618.818	(88,68)
Jumlah	13.584.409.156	18.275.935.263	(25,671)

Penurunan beban persediaan utamanya disebabkan karena penurunan pembelian persediaan karena pelaksanaan sistem kerja *integrated digital workspace* di unit Kementerian PPN/Bappenas. Perhitungan Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 83 Perbandingan Rincian Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Persediaan Konsumsi	12.943.410.188	13.833.460.740	(890.050.552)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, Leges		19.476.500	(19.476.500)
Beban Persediaan Bahan Baku	455.344.600	-	455.344.600
Beban Persediaan Lainnya	185.654.368	-	185.654.368
Jumlah	13.584.409.156	13.852.937.240	(268.528.084)

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 84 Selisih nilai Beban Persediaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal Persediaan	88.524.541.338	
Pembelian (LRA)	13.834.456.740	
Jumlah Persediaan		102.358.998.078
Saldo Akhir Persediaan	6.322.466.604	
Persediaan yang diserahkan ke masyarakat	82.956.670.441	
Saldo Beban Persediaan - LO		13.079.861.033

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.518.044.198.005,44 dan Rp1.585.356.306.021,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas. Perbandingan rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 85 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Langganan Daya dan Jasa	1.507.709.534	944.222.347	59,68
Beban Jasa Pos dan Giro	5.848.300	39.517.120	(85,20)
Beban Jasa Konsultan	992.936.148.797	1.044.764.439.052	(4,96)
Beban Jasa Profesi	25.631.622.132	37.302.182.110	(31,29)
Beban Jasa Lainnya	104.560.765.074	124.908.390.683	(16,29)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID	16.598.611.971	-	-
Beban Sewa	111.779.233.190	87.778.098.327	27,34
Beban Air, Listrik, Telepon	7.237.607.616	7.908.432.075	(8,48)
Beban Pengganti Pajak	-	-	-
Beban Barang Non Operasional	144.625.876.746	150.056.029.810	(3,62)
Beban Barang Non Operasioal- Penanganan Pandemi	1.850.702.642	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	26.063.600.500	30.497.403.500	(14,54)
Beban Bahan	27.216.065.832	55.241.816.131	(50,73)
Beban Barang Operasional	17.799.674.226	10.309.435.452	72,65
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID	5.865.986.858	-	-
Beban Honor Operasional	4.124.310.000	4.552.471.000	(9,41)
Beban Pengiriman Surat Dinas	440.629.419	301.054.882	46,36
Beban Keperluan Perkantoran	29.836.356.338	30.863.796.477	(3,33)
Beban Barang Transito	-	-	-
Beban Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	182.957.810	298.612.555	(38,73)
Beban dalam Rangka Refund Dana PHLN	-	22.000.000	(100,00)
Jumlah Beban	1.518.263.706.985	1.585.787.901.521	(4,26)
Pengembalian	(219.508.980)	(431.595.500)	(49,14)
Jumlah	1.518.044.198.005	1.585.356.306.021	(4,246)

Penurunan beban barang dan jasa utamanya disebabkan karena penurunan Beban Bahan, Beban Honor Output Kegiatan dan Beban Jasa Profesi diakibatkan pembatasan kegiatan karena pandemi Covid-19.

Akun Beban Jasa Konsultan telah dibebankan sebagai belanja dari hibah langsung uang READSI senilai Rp210.000.000,00 atas pembayaran jasa konsultan bulan November dan Desember 2020 dengan kuitansi per 30 November dan 31 Desember 2020. Namun pembayaran dilakukan pada bulan Januari 2021. Belanja hibah tersebut telah dilakukan pengesahan SPHL.

Selain itu, akun beban Jasa Lainnya telah membebaskan transaksi pembayaran belanja hibah langsung uang READSI atas *trainer food system oxford* senilai Rp58.134.000,00 di tahun 2020 namun belum dilakukan pengesahan belanja.

Adapun perbandingan antara saldo Beban Barang dan Jasa pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 86 Perbandingan Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Langganan Daya dan Jasa	1.507.709.534	1.511.442.688	(3.733.154,00)
Beban Jasa Pos dan Giro	5.848.300	5.848.300	-
Beban Jasa Konsultan	992.936.148.797	196.945.185.513	795.990.963.284,44
Beban Jasa Profesi	25.631.622.132	19.515.551.897	6.116.070.235,00
Beban Jasa Lainnya	104.560.765.074	104.556.139.566	4.625.508,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID	16.598.611.971	22.844.536.971	(6.245.925.000,00)
Beban Sewa	111.779.233.190	111.875.720.858	(96.487.668,00)
Beban Air, Listrik, Telepon	7.237.607.616	7.285.291.873	(47.684.257,00)
Beban Pengganti Pajak	-	-	-
Beban Barang Non Operasional	144.625.876.746	145.218.333.981	(592.457.235,00)
Beban Barang Non Operasioal- Penanganan Pandemi	1.850.702.642	1.793.700.142	57.002.500,00
Beban Honor Output Kegiatan	26.063.600.500	26.110.995.000	(47.394.500,00)
Beban Bahan	27.216.065.832	27.556.860.907	(340.795.075,00)
Beban Barang Operasional	17.799.674.226	17.815.449.426	(15.775.200,00)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID	5.865.986.858	5.891.011.352	(25.024.494,00)
Beban Honor Operasional	4.124.310.000	4.124.310.000	-
Beban Pengiriman Surat Dinas	440.629.419	440.629.419	-
Beban Keperluan Perkantoran	29.836.356.338	29.881.737.050	(45.380.712,00)
Beban Barang Transit	-	-	-
Beban Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	182.957.810	-	182.957.810,00
Beban dalam rangka refund PHLN	-	-	-
Jumlah Beban	1.518.263.706.985	723.372.744.943	794.890.962.042
Pengembalian	(219.508.980)	(66.028.960)	(153.480.020,00)
Jumlah	1.518.044.198.005	723.306.715.983	794.737.482.022

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 87 Selisih nilai Barang dan Jasa pada LO dan LRA
per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Barang dan Jasa - LRA		723.306.715.983
Penambah		
Saldo Belanja Barang dan Jasa - LRA		
Penambah		
Beban Jasa Konsultan	795.990.963.284,44	
Beban Jasa Profesi	6.116.070.235,00	
Beban Jasa Lainnya	4.625.508,00	
Beban Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID	57.002.500	
Beban Ekstrakomptable Peralatan dan Mesin	182.957.810	
Jumlah Penambah	802.351.619.337	
Pengurang		
Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID	(6.245.925.000,00)	
Beban Air, Listrik, Telepon	(47.684.257)	
Beban Honor Output Kegiatan	(47.394.500)	
Beban Bahan	(340.795.075)	
Beban Barang Operasional	(15.775.200)	
Beban Operasional Penanganan Pandemi COVID	(25.024.494)	
Beban Keperluan Kantor	(45.380.712)	
Beban Langganan Daya dan Jasa	(3.733.154)	
Beban Barang Non Operasional	(592.457.235)	
Beban Sewa	(96.487.668)	
Pengembalian	(153.480.020)	
Jumlah Pengurang	(7.614.137.315)	
Total Tambah/Kurang		794.737.482.022
Saldo Beban Persediaan - LO		1.518.044.198.005

Selain itu, terdapat koreksi BPK terkait akun belanja jasa pandemi Covid-19 (522192) sebesar Rp6.352.375.000,00 atas realisasi penggunaan akun belanja jasa pandemi untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 88 Perhitungan Koreksi Akun Belanja Jasa
Penanganan Pandemi Covid-19

(dalam rupiah)

PPK	Nilai Koreksi BPK	Telah Dikoreksi Kesalahan MAK Belanja	Kesalahan Input MAK	Hasil Konfirmasi MAK COVID 522192 oleh PPK	
				Terkait Langsung Covid	Total Nilai Tidak Terkait Langsung Covid
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A-B-C-D)
DM I	395.000.000	-	-	-	395.000.000
DM II	130.950.000	-	-	4.100.000	126.850.000
DM VI	174.900.000	-	-	-	174.900.000
PPN I	1.686.568.500	-	-	1.472.318.500	214.250.000
PPN II	1.008.275.000	61.925.000	-	-	946.350.000
PPN III	704.505.000	-	-	177.055.000	527.450.000
PPN IV	716.050.000	256.500.000	-	-	459.550.000
PPN V	559.300.000	-	5.000.000	-	554.300.000
PPN VI	444.125.000	-	-	-	444.125.000
PPN VII	84.900.000	-	-	-	84.900.000
PPN VIII	1.297.550.000	-	-	-	1.297.550.000
PPN IX	290.700.000	-	-	-	290.700.000
PPN X	363.300.000	-	-	-	363.300.000
PPN XI	34.400.000	-	-	-	34.400.000
PPN XII	4.700.000	-	-	-	4.700.000
PPN XIV/ICCTF	107.850.000	103.650.000	-	-	4.200.000
PPN XV/KNKS	193.900.000	-	-	-	193.900.000
PPN XVII/COMPACT 2	14.000.000	14.000.000	-	-	-
PPN XVII	235.950.000	-	-	-	235.950.000
Total	8.446.923.500	436.075.000	5.000.000	1.653.473.500	6.352.375.000

Beban berupa realisasi hibah langsung jasa atas 25 program senilai Rp853.704.341.238,00. Berikut table MPHL TA 2020:

Tabel 89 MPHL per 31 Desember 2020

No	No. Register	Kegiatan - Donor	Belanja Hibah	No MPHL	Tanggal	Akun
1	2UXLX1GA	MRV - GIZ	Rp 9.534.907.700	8714317543575646	24 Maret 2020	522131
2	74900201	AIP-PRISMA - DFAT	Rp 42.124.268.562	8745831548041027	23 April 2020	522131
3	2VBMBK3A	KOMPAK - DFAT	Rp 23.108.976.055	8745827548041031	23 April 2020	522131
4	27VDG2UA	DR-DRRP - JICA	Rp 2.692.290.560	8759406553509473	13 Mei 2020	522131
5	2QR18DFA	KSI - DFAT	Rp 13.344.251.203	8780840558804861	02 Juni 2020	522131
6	2ANAKPPA	ARISE+TSF - EU	Rp 11.726.651.414	8801320562956831	23 Juni 2020	522131
7	2RF9M19A	GGP Phase II - GGGI	Rp 6.282.220.800	8839493573210473	30 Juli 2020	522131
8	2VNM3K6A	ICED II (UEP) - USAID	Rp 57.990.625.301	8839650573210472	30 Juli 2020	522131
9	74973301	SIAP - ADB	Rp 35.942.245.356	8839833573210474	30 Juli 2020	522131
10	2VNM3K6A	IUWASH PLUS - USAID	Rp 31.757.028.563	8886746578299183	09 September 2020	522131
11	2FR4C6KA	KIAT - DFAT	Rp 44.016.097.420	8886763578299177	09 September 2020	522131
12	26XPYRCA	ISED - GIZ	Rp 5.308.219.915	8886748578299179	09 September 2020	522131
13	2HNX7DGA	PAKLIM III - GIZ	Rp 2.692.202.291	8886765578299182	09 September 2020	522131
14	2HNX7DGA	PAKLIM III - GIZ	Rp 4.833.974.856	8886771578299180	09 September 2020	522131
15	27MAMT9A	GMC - UNDP	Rp 1.943.144.329	8903591581725712	23 September 2020	522131
16	2QR18DFA	KSI - DFAT	Rp 22.389.233.185	8947287592645029	06 November 2020	522131
17	2162E4GA	LEOPALD - GIZ	Rp 7.054.411.486	8947286592645017	06 November 2020	522131
18	2162E4GA	LEOPALD - GIZ	Rp 93.350.000	8954294594617894	11 November 2020	132111
19	2HZBGPSA	Alat Rapid Test COVID - Yayasan BakauMU	Rp 270.000.000	8974042599200404	27 November 2020	117111
20	71125701	SCAA-USAID	Rp 3.225.858.415	8974044599200402	27 November 2020	522131
21	27MAMT9A	GMC-UNDP	Rp 950.895.844	8974047599200403	27 November 2020	132111
22	2NNZYN8A	NSLICY/NSELRED-GAC	Rp 81.545.445.150	8102466361024422	31 Desember 2020	522131
23	2Y9QWFU	Mampu Fase II - DFAT	Rp 14.066.436.961	8102527361024422	31 Desember 2020	522131
24	74858801	Mampu - DFAT	Rp 176.518.474	8102760161040102	31 Desember 2020	132111
25	2Y9QWFU	Mampu Fase II - DFAT	Rp 346.151.050	8102526361024422	31 Desember 2020	132111 - 162151
26	2LV9UC9A	RI-UNFPA Siklus ke-9(2016-2020) - UNFPA	Rp 4.617.643.862	8102551461024422 5	31 Desember 2020	522131
27	2XFJZUTA	RI-UNICEF	Rp 60.193.164.578	8102759861040102	31 Desember 2020	522131
28	2VNM3K6A	ICED II (UEP) - USAID	Rp 34.193.000.894	8102220460971999	31 Desember 2020	522131
29	2Y9QWFU	Mampu Fase II - DFAT	Rp 67.858.895.600	8102220560971999	31 Desember 2020	522131
30	2VBMBK3A	KOMPAK - DFAT	Rp 21.171.207.234	8102220660971999	31 Desember 2020	522131
31	2KEC23UA	SIAP Phase II - ADB	Rp 23.295.388.725	8102220760971998	31 Desember 2020	522131
32	2VNM3K6A	IUWASH PLUS - USAID	Rp 28.618.863.971	8102408461024421	31 Desember 2020	522131
33	72226401	USDP - Kerajaan	Rp 27.987.600.762	8102408361024421	31 Desember 2020	522131
34	72226401	USDP - Kerajaan	Rp 81.179.061.510	8102408261024422	31 Desember 2020	522131
35	2K9AHR3A	GFCP - FCDO, UK	Rp 43.022.031.139	8102408161024422	31 Desember 2020	522131
36	2QR18DFA	KSI Phase II - DFAT	Rp 16.317.640.180	8102434161024422	31 Desember 2020	522131
37	24BX2GYA	SPP - GIZ	Rp 21.834.437.893	8103099261126670	31 Desember 2020	522131
Total			Rp853.704.341.238			

Beban Pemeliharaan
Rp17.953.512.020,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp17.953.512.020,00 dan Rp17.541.575.727,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.666.781.894	5.601.273.800	19,02
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.665.362.108	10.825.645.162	7,76
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		451.290.000	(100,00)
Beban Persediaan Suku Cadang	19.497.990	59.615.546	(67,29)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	254.005.399	569.648.448	(55,41)
Beban Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	1.125.000		-
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	47.290.339		-
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	-	33.752.771	(100,00)
Beban Pemeliharaan	-	350.000	(100,00)
Jumlah Beban	18.654.062.730	17.541.575.727	6,34
Pengembalian	(700.550.710)	-	-
Jumlah	17.953.512.020	17.541.575.727	2,3483

Peningkatan Beban ditahun anggaran 2020 disebabkan karena peningkatan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, antara lain pemeliharaan taman, pengecatan, penambahan atap Gedung dan penggantian keramik ditahun 2020. Sedangkan kenaikan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin antara lain untuk servis mobil dinas dan pemeliharaan cctv. Selain itu, terdapat Beban Asuransi Gedung dan Bangunan ditahun 2020 dalam bentuk asuransi gedung, lift, genset dan pagar. Dikarenakan salah pengklasifikasian akun, akun Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina dilakukan reklasifikasi ke akun Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.

Adapun perbandingan antara saldo Beban Pemeliharaan pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 91 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.666.781.894	6.527.883.294	138.898.600
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.665.362.108	11.802.470.441	(137.108.333)
Beban Pemeliharaan Lainnya		-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	19.497.990	-	19.497.990
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	254.005.399	-	254.005.399
Beban Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	1.125.000	-	1.125.000
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	47.290.339	47.290.339	-
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	-	26.249.216	(26.249.216)
Jumlah Beban	18.654.062.730	18.403.893.290	250.169.440
Pengembalian	(700.550.710)	(700.550.710)	-
Jumlah	17.953.512.020	17.703.342.580	250.169.440

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 92 Selisih nilai Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Pemeliharaan - LRA		17.703.342.580
Penambah		
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	138.898.600	
Beban Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	1.125.000	
Beban Persediaan Suku Cadang	19.497.990	
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	254.005.399	
Jumlah Penambah	413.526.989	
Pengurang		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(137.108.333)	
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP)	(26.249.216)	
Jumlah Pengurang	(163.357.549)	
Total Tambah/Kurang		250.169.440
Saldo Beban Persediaan - LO		17.953.512.020

Beban Perjalanan Dinas Rp
112.666.543.427,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp112.666.543.427,00 dan Rp365.843.175.874,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 93 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	45.723.525.899	145.240.786.382	(68,52)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.635.463.600	3.143.618.981	(47,98)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.309.927.610	81.186.667.460	(77,45)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID 19	3.067.650.000	-	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	40.834.418.261	105.383.292.221	(61,25)
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	3.747.585.332	19.162.386.130	(80,44)
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	364.427.320	16.382.982.038	(97,78)
Jumlah Beban	113.682.998.022	370.499.733.212	(69,32)
Pengembalian	(1.016.454.595)	(4.656.557.338)	(78,17)
Jumlah	112.666.543.427	365.843.175.874	(69,204)

Terdapat Penurunan beban perjalanan dinas TA 2020 utamanya disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan perjalanan dinas akibat pandemi Covid-19.

Adapun perbandingan antara saldo Beban Perjalanan Dinas pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 94 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	45.723.525.899	46.454.310.558	(730.784.659)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.635.463.600	1.638.763.600	(3.300.000)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.309.927.610	18.351.922.110	(41.994.500)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID 19	3.067.650.000	3.067.650.000	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	40.834.418.261	40.771.343.196	63.075.065
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	3.747.585.332	3.747.585.332	-
Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	364.427.320	364.427.320	-
Jumlah Beban	113.682.998.022	114.396.002.116	(713.004.094)
Pengembalian	(1.016.454.595)	(1.016.454.595)	-
Jumlah	112.666.543.427	113.379.547.521	(713.004.094)

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 95 Selisih Nilai Beban Perjalanan Dinas pada LO dan LRA per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Perjalanan Dinas - LRA		113.379.547.521
Penambah		
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	63.075.065	
Jumlah Penambah	63.075.065	
Pengurang		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.300.000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41.994.500	
Beban Perjalanan Biasa	730.784.659	
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID 19	-	
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	-	
Jumlah Pengurang	776.079.159	
Total Tambah/Kurang		(713.004.094)
Saldo Beban Persediaan - LO		112.666.543.427

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp98.781.019.703,00

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp98.781.019.703,00 dan Rp903.122.004.477,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 96 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	8.597.374.046	2.906.836.648	196
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	2.695.169.719	4.294.617.114	(37)
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	46.785.182.527	808.053.874.347	(94)
Beban Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	-	66.769.607.066	(100)
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada masyarakat	24.878.944.149	-	-
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah	18.634.729.494	-	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	-	21.097.069.302	(100)
Jumlah Beban	101.591.399.935		
Pengembalian	(2.810.380.232)		
Jumlah	98.781.019.703	903.122.004.477	(89,062)

Penurunan Beban Barang Yang diserahkan kepada masyarakat ditahun 2020 dikarenakan telah dilakukan penyelesaian dalam bentuk serah terima kepada masyarakat.

Tabel 97 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada LO dan LRA per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	8.597.374.046	-	8.597.374.046
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	2.695.169.719	-	2.695.169.719
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	46.785.182.527	-	46.785.182.527
Beban Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	-	-	-
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada masyarakat	24.878.944.149	-	24.878.944.149
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah	18.634.729.494	-	18.634.729.494
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	-	-	-
Jumlah	101.591.399.935	-	101.591.399.935
Pengembalian	(2.810.380.232)		(2.810.380.232)
Jumlah	98.781.019.703	-	98.781.019.703

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 98 Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada LO dan LRA per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Saldo Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat - LRA		-
Penambah		
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	46.785.182.527	
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	8.597.374.046	
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	2.695.169.719	
Beban Persediaan Aset Lain-lain untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Panitia	24.878.944.149	
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah	18.634.729.494	
Jumlah Penambah	101.591.399.935	
Pengurang		
Pengembalian Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki	2.810.380.232	
Jumlah Pengurang	2.810.380.232	
Total Tambah/Kurang		98.781.019.703
Saldo Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat - LO		98.781.019.703

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 82.088.076.115,00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp82.088.076.115,00 dan Rp68.644.464.941,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 99 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	65.568.041.506	55.234.497.964	18,71
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.812.767.571	7.723.303.038	1,16
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	181.345.013	181.345.015	(0,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	722.834.835	741.614.013	(2,53)
Jumlah Penyusutan	74.284.988.925	63.880.760.030	16,29
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.803.087.190	4.763.704.911	63,80
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	7.803.087.190	4.763.704.911	63,80
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	82.088.076.115	68.644.464.941	19,584

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp 2.680.165,00

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.680.165,00 dan Rp259.025,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 100 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	51.805	259.025	(80,00)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	631.579	-	-
Beban Penyisihan Piutang PNB	1.996.781	-	-
Jumlah Penyisihan	2.680.165	259.025	934,713

Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp512.878.889,00

D.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan pelepasan aset non lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp512.878.889,00 dan Rp1.023.539.644,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 101 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	Desember 2020	Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	1.023.539.644	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	512.878.889	-	-
Jumlah	512.878.889	1.023.539.644	(49,89)

Penambahan disebabkan oleh Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin karena terdapat penjualan Mobil Dinas Tanpa Lelang. Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 102 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada LO dan LRA per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	512.878.889	86.878.889	426.000.000
Jumlah	512.878.889	86.878.889	426.000.000,00

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin untuk LRA sebesar Rp86.878.889,00 berasal dari setoran pada SIMPONI berupa lelang Peralatan dan Mesin berupa 9 unit brandkas yang telah dilakukan penghapusan di tahun 2020 sebesar Rp16.171.819,00 dan 1 unit kijing innova G yang akan dilakukan penghapusan di tahun 2021 sebesar Rp70.707.070,00.

Sedangkan untuk di LO sebesar Rp512.878.889,00 berasal dari setoran pada SIMPONI berupa Rp86.878.889,00 seperti dijelaskan diatas dan pembayaran penjualan kendaraan tanpa lelang berupa 4 unit Toyota Camry sebesar Rp426.000.000,00.

Beban
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp137.500.909,00

D.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban dari pelepasan aset non lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp137.500.909,00. dan Rp461.465.409,00.

Tabel 103 Realisasi Beban Pelepasan Aset Non Lancar
per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	Desember 2020	Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	137.500.909	461.465.409	(70,20)
Jumlah	137.500.909	461.465.409	(70,20)

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp8.994.562.362,00

D.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp8.994.562.362,00 dan Rp15.958.915.433,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 104 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	66.258.848	36.389.578	82,08
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.995.640.499	3.270.441.023	(38,98)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	37.445.535	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	6.655.285.462	12.562.834.217	(47,02)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	51.805.080	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	242.377.553	-	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	35.000.000	-	-
Jumlah	8.994.562.362	15.958.915.433	(43,639)

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dengan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 105 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
pada LO dan LRA per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Pendapatan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	66.258.848	67.878.848	(1.620.000)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.995.640.499	1.994.020.499	1.620.000
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	6.655.285.462	-	6.655.285.462
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	242.377.553	89.805.080	152.572.473
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	35.000.000	-	35.000.000
Jumlah	8.994.562.362	2.151.704.427	6.842.857.935

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 106 Selisih Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada LO dan LRA per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- LRA		2.151.704.427
Penambah		
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	6.655.285.462	
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	152.572.473	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.620.000	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Pegawai	35.000.000	
Jumlah Penambah	6.844.477.935	
Pengurang		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(1.620.000)	
Jumlah Pengurang	(1.620.000)	
Total Tambah/Kurang		6.842.857.935
Saldo Beban Persediaan - LO		8.994.562.362

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp 9.266.332.781,00

D.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp9.266.332.781,00 dan Rp14.482.630.961,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 107 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	6.145.870.682	14.237.560.823	(56,83)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.841.873.478	245.070.138	1.059,62
Beban Persediaan Rusak/Usang	278.588.620		
Jumlah	9.266.332.780	14.482.630.961	(36,018)

Tabel 108 Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya antara LO dan LRA per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian Jenis Beban	LO	LRA	Selisih
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	6.145.870.682	-	-
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.841.873.478	-	-
Beban Persediaan Rusak/Usang	278.588.620	-	-
Jumlah	9.266.332.780		

Pos Luar Biasa Rp0,00

D.14. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp2.629.750.217.776,00

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.629.750.217.776,00 dan Rp1.606.311.148.017,00.

Defisit LO
Rp(1.991.480.239.369,00)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(1.991.480.239.369,00) dan Rp(3.117.249.660.107,00).

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas
Rp55.929.612.705,00

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp55.929.612.705,00 dan Rp1.733.431.226.092,00. Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari :

Tabel 109 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
(Dalam Rupiah)

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	Nilai
Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-
Penyesuaian Nilai Aset	-
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi atas Reklasifikasi	2.808.800
Selisih Revaluasi Aset	57.006.925.695
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(195.763.386)
Koreksi Lain-lain	(884.358.404)
Jumlah	55.929.612.705

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Selisih Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi atas Reklasifikasi
Rp2.808.800,00

E.3.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.808.800,00 dan Rp(13.638.230.904,00).

Tabel 110 Rincian Koreksi atas Reklasifikasi

(Dalam Rupiah)

Satker	Nilai
MWA ICCTF	-
MCC	(139.200)
KNKS	2.948.000
Jumlah	2.808.800

Koreksi atas reklasifikasi merupakan transaksi yang muncul akibat proses koreksi atas aset yang sudah direklasifikasi.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp57.006.925.695,00

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp57.006.925.695,00 dan Rp1.342.010.649.166,00.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp(195.763.386,00)

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(195.763.386,00) dan Rp407.852.279.839,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari :

Tabel 111 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	Nilai
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.192.368.471
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(3.388.131.857)
Jumlah	(195.763.386)

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per Satker terdiri dari:

Tabel 112 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Bappenas	3.192.368.471
2	MCC	-
3	Satker Konsolidasi	-
Jumlah		3.192.368.471

Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per Satker terdiri dari :

Tabel 113 Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Bappenas	(3.376.622.105)
2	MCC	(11.509.752)
3	Satker Konsolidasi	-
Jumlah		(3.388.131.857)

Koreksi Lain-Lain
Rp(884.358.404,00)

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(884.358.404,00) dan Rp(2.793.472.009,00). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. Berikut rincian transaksi koreksi lainnya berdasarkan satker:

Tabel 114 Rincian Koreksi Lainnya Berdasar Satker

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Nilai
1	Bappenas	(860.320.360)
2	KNKS	(24.038.496)
3	ICCTF	452
Jumlah		(884.358.404)

Berikut merupakan perhitungan Koreksi Lain-lain untuk Satker Bappenas:

Tabel 115 Rincian Koreksi Lain-lain Satker Bappenas

(Dalam Rupiah)

Koreksi Lainnya	Nilai
Jurnal Balik Pengembalian Belanja TAYL Bulan Januari 2020	(1.055.193.905)
Jurnal Balik Pengembalian Belanja TAYL Bulan Februari 2020	(225.050.846)
Jurnal Balik Pengembalian Belanja TAYL Bulan Maret 2020	(100.887.244)
Jurnal Balik Pengembalian Belanja BBM Januari - Desember 2019 (523121)	(331.328.371)
Reklasifikasi penyisihan dari BL TGR TA 2019	259.025
Penetapan Penyisihan BL TGR	51.805
Jurnal untuk menghapus Belanja hibah langsung yang belum disahkan dari Sekretariat Hibah READSI 2019 (Saldo Awal) dari SAIBA	851.829.176
Jumlah	(860.320.360)

Berikut merupakan perhitungan Koreksi Lain-lain untuk Satker KNKS:

Tabel 116 Rincian Koreksi Lain-lain Satker KNKS

(Dalam Rupiah)

Koreksi Lainnya	Nilai
Jurnal Balik Pengembalian Belanja yang belum disetorkan per 31 Desember 2019	(6.511.496)
Jurnal Balik Pengembalian Belanja TAYL Bulan Februari 2020	(17.512.000)
Jurnal Balik Kelebihan Rp 15.000 milik Satker Bappenas	(15.000)
Jumlah	(24.038.496)

Berikut merupakan perhitungan Koreksi Lain-lain untuk Satker ICCTF:

Tabel 117 Rincian Koreksi Lain-lain Satker ICCTF

(Dalam Rupiah)

Koreksi Lainnya	Nilai
SSBP Pengembalian Jasa Giro Hibah USAID TA 2015 yang ada temuan auditor tahun 2019 dibayarkan di TA 2020	(2.287.530)
Jurnal Manual atas Pembulatan Koreksi Persediaan Belum Diregister	452
Koreksi Kesalahan Jurnal Manual di LK Semester I TA 2020 atas saran BPK	2.287.530
Jumlah	452

Transaksi Antar Entitas
Rp1.964.829.000.421,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.964.829.000.421,00 dan Rp2.407.257.503.774,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 118 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

(Dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima Dari Entitas Lain	(2.258.763.546)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.104.545.787.065
Transfer Masuk	5.875.638.682
Transfer Keluar	(18.414.908.365)
Pengesahan Hibah Langsung	875.081.246.585
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	1.964.829.000.421

Diterima dari Entitas Lain
Rp(2.258.763.546,00)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp1.104.545.787.065,00

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan Bendahara Umum Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp(2.258.763.546,00) sedangkan DKEL sebesar Rp1.104.545.787.065,00.

Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker terdiri dari :

Tabel 119 Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) per Satker
(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS	(2.176.367.142)
Komite Nasional Keuangan Syariah	(24.023.496)
Majelis Wali Amanat Dana ICCTF	(13.495.030)
Pengelola Hibah MCC	(44.877.878)
Jumlah	(2.258.763.546)

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain(DKEL) per Satker terdiri dari :

Tabel 120 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per Satker
(Dalam Rupiah)

Satker	Nilai
KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS	1.044.189.267.270,
Bappeda Provinsi Jawa Tengah	569.317.100,
Bappeda Provinsi DIY	232.380.450,
Bappeda Provinsi Jawa Timur	72.201.400,
BAPPEDA PROVINSI ACEH	117.767.050,
Bappeda Provinsi Sumatera Utara	103.588.600,
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	380.599.780,
BAPPEDA PROVINSI RIAU	286.753.222,
BAPPEDA PROVINSI JAMBI	235.443.596,
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	371.855.065,
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	555.431.189,
BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	272.552.184,
BAPPEDA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	190.198.929,
Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	319.240.000,
BAPPEDA PROP.KALTIM	376.035.500,
Bappeda Provinsi Sulawesi Utara	583.869.615,
Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	292.220.800,
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	104.833.650,
Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	247.838.881,
BAPPEDA PROVINSI MALUKU	652.271.641,
Bappeda Provinsi Bali	392.110.595,
BAPPEDA PROV. NUSA TENGGARA BARAT	363.642.066,
Bappeda Provinsi NTT	318.263.400,
Bappeda Provinsi Bengkulu	463.237.700,
BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA	271.197.200,
BAPPEDA PROVINSI BANTEN	196.321.400,
BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	248.995.647,
Bappeda Provinsi Gorontalo	601.930.416,
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	226.652.708,
Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	270.959.155,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KALIMANTAN UTARA	450.791.746,
KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH	22.043.054.808,
Pengelola Hibah MCC	3.332.439.187,
Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ICCTF	25.212.525.115,
Jumlah	Rp 1.104.545.787.065

Nilai DKEL sebesar Rp1.104.545.787.065,00 berasal dari seluruh transaksi yang telah terbit SP2D dikurangi pengembaliannya SSPB. Sedangkan nilai DDEL sebesar Rp(2.258.763.546,00) merupakan seluruh setoran penerimaan ke Bendahara Umum Negara melalui setoran SSBP.

Transfer Masuk
Rp5.875.638.682,00
/ Transfer Keluar Rp
(18.414.908.365,00)

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer masuk/transfer keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.875.638,682,00 sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(18.414.908.365,00).

Rincian Transfer Masuk/Transfer Keluar diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 121 Rincian Transfer Masuk per Satker

(Dalam Rupiah)

Satker	Nilai
KANTOR MENTERI NEGARA PPN/BAPPENAS	5.875.638.682
Jumlah	5.875.638.682

Nilai Transfer Masuk sebesar Rp5.875.638.682,00 merupakan :

1. Alih status dari Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah (Satker KNKS) sebesar Rp2.308.673.591,00;
2. Alih status dari Satuan Kerja Pengelola Hibah *Millenium Challenge Corporation* (Satker MCC) sebesar Rp3.566.965.091,00.

Tabel 122 Rincian Transfer Keluar per Satker

(Dalam Rupiah)

Satker	Nilai
KNKS	(2.754.199.941)
MCC	(15.660.708.424)
Jumlah	(18.414.908.365)

Nilai Transfer Keluar sebesar (Rp18.414.908.365,00) merupakan :

1. Alih status dari Satuan Kerja Komite Nasional Keuangan Syariah (Satker KNKS) kepada Sekretariat Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah dan Kantor Menteri Negara PPN / Bappenas;
2. Alih status dari Satuan Kerja Pengelola *Hibah Millenium Challenge Corporation* (Satker MCC) kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas.

Pengesahan Hibah Langsung
Rp875.081.246.585,00

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Rp0,00

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp875.081.246.585,00 sedangkan untuk Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp(0,00).

Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker adalah sebagai berikut.

Tabel 123 Rincian Pengesahan Hibah Langsung per Satker
(Dalam Rupiah)

Satker	Nilai
KANTOR MENTERI NEGARA PPN /BAPPENAS	875.081.246.585
Jumlah	875.081.246.585

Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung adalah sebagai berikut.

Tabel 124 Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per Satker
(Dalam Rupiah)

Satker	Nilai
-	-
Jumlah	-

Ekuitas Akhir
Rp2.659.028.591.533,00

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.659.028.591,00 dan Rp2.629.750.217.776,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

*Kejadian –
Kejadian Penting
Setelah Tanggal
Neraca*

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.1.1. PNBP Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

- a. Terdapat setoran PNBP TAYL pada bulan Januari 2021 senilai Rp125.257.123,00 dan Rp5.485.000,00 telah dilakukan koreksi SPM. Pada bulan Februari 2021 per tanggal 21 Februari 2021 senilai Rp67.694.144,00. Rincian PNBP TAYL dapat dilihat pada lampiran 3;
- b. Terdapat Piutang BOT Gedung Wisma Bakie Rp396.052.110,00 merupakan setoran BOT TA 2020 rincian dapat dilihat pada lampiran 7;
- c. Terdapat Sisa Pengembalian TUP Senilai Rp70.644.793,00 (815514) rincian dapat dilihat pada lampiran 20;
- d. Terdapat temuan BPK Tahun Anggaran 2019 atas pengembalian dari kegiatan FMSRB PPK PPN XI yang disetor tahun 2021 ke Kas Negara senilai Rp8.690.000,00. Pengembalian belanja tersebut sudah dilakukan koreksi akun ke akun 425912.

*Pengungkapan
Lain-lain*

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Selain data keuangan yang telah diungkapkan diatas, terdapat beberapa informasi terkait data keuangan dan non keuangan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA 2020 Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian Keuangan yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satker Bappenas dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk satuan kerja MCC, ICCTF dan KNKS sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
2. Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan bulan Desember tahun 2020 melakukan 9 (sembilan) kali revisi DIPA dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Realokasi kegiatan dari unit kerja;
 - b. *Refocusing* Anggaran;
 - c. Realokasi kegiatan dari unit kerja;
 - d. Realokasi anggaran Tunjangan Kinerja;
 - e. Penambahan hibah;
 - f. Realokasi anggaran ke unit kerja;
 - g. Hibah Langsung;
 - h. Pemutakhiran data revisi;
 - i. Pengesahan Hibah Langsung.
3. Rekomendasi atas Temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahunan TA 2019 masih dalam proses tindak lanjut sebagaimana terlampir dalam lampiran 20.

F.2.1. Rekening Pemerintah

1. Dalam penyelenggaraan Bagian Anggaran 055, satuan kerja pusat/KP memiliki 4 rekening Bendahara Pengeluaran dan 21 rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu yang digunakan dan dipertahankan sedangkan pada satuan kerja Dekonsentrasi/DK memiliki 32 rekening Bendahara Pengeluaran yang digunakan dan dipertahankan. Dalam rangka menindaklanjuti PMK No.183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga, pada bulan Desember 2020, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan restrukturisasi atas 49 dari total 57 rekening pengeluaran giro menjadi rekening pengeluaran virtual (*Virtual Account*). 8 rekening pengeluaran belum dilakukan restrukturisasi menjadi rekening virtual dikarenakan sebagai berikut:
 - a. Bank tempat rekening pengeluaran dibuka belum menjadi mitra Kementerian Keuangan;
 - b. Terdapat satker dana dekonsentrasi yang tidak aktif (tidak ada penunjukkan KPA dan perangkatnya) selama TA 2020.Rincian rekening pemerintah sebagaimana tersaji pada lampiran 14.
2. Selain tersebut di atas, Kementerian PPN/Bappenas juga memiliki 3 rekening lainnya yang merupakan rekening untuk menampung

dana hibah langsung uang di Satker Bappenas. Rincian rekening lainnya sebagaimana tersaji pada lampiran 14.

F.2.2. Informasi Pandemi Covid-19

1. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik No.S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, Kementerian PPN/Bappenas melakukan *refocussing* anggaran dengan melakukan penyesuaian pagu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp611.409.090.000,00, sehingga pagu Kementerian PPN/Bappenas yang semula berjumlah Rp1.829.166.798.000,00 menjadi Rp1.217.757.708.000,00.
2. Total realisasi penggunaan anggaran Covid-19 TA 2020 sebagai berikut:

Tabel 125 Selisih Realisasi antara LKPP dan CALK

(Dalam Rupiah)

Uraian	Belanja Covid	
	Belanja Barang	Belanja Modal
LKPP	28.816.973.829	1.855.831.763
CALK	33.594.593.985	1.855.831.763
	-4.777.620.156	0

Terdapat selisih saldo realisasi Belanja Barang Covid sebesar Rp4.777.620.156,00 antara CALK Kementerian PPN/Bappenas dengan LKPP. Pihak Kementerian PPN/Bappenas telah berkoordinasi dengan Direktorat Akutansi dan Pelaporan Keuangan (APK) selaku penyusun LKPP. Kesimpulannya, bahwa LKPP akan mengikuti saldo dari K/L (yang didapatkan melalui saldo e-rekon)

3. Terdapat kesalahan penggunaan akun Covid. Semula, beberapa kegiatan baru yang timbul di masa pandemi Covid-19, seperti pembayaran honorarium narasumber pada rapat/seminar yang dilaksanakan secara jarak jauh/virtual dan pengadaan kit kesehatan bagi pegawai WFO (sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi, dibebankan dengan menggunakan akun khusus Covid-19. Namun, melalui Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S16/PB/PB.6/2020 perihal Penyampaian *Frequently Asked Questions* (FAQ)

Penggunaan Akun Khusus Belanja Dampak dan Penanganan Pandemi Covid-19, ditegaskan bahwa akun khusus Covid-19 diperuntukkan bagi kegiatan dan semua pengeluaran pendukung yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi dan/atau timbul sebagai bagian dari dampak pandemi.

4. Akibat kesalahan pembebanan akun khusus Covid-19, maka dilakukan koreksi SPM. Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan koreksi nilai sebesar Rp545.120.202,00.

Tabel 126 Koreksi SPM Tahun Anggaran 2020

(Dalam Rupiah)

PPK	No SPM	MAK semula	MAK koreksi	Nilai
PPK PPN XVI/COMPACT 2	06343T	522192	522151	14.000.000
ICCTF	00060T	521241	521211	3.326.332
		522192	522151	37.200.000
	00061T	522192	522151	6.900.000
		521241	521211	29.093.569
	00083T	522192	522151	29.500.000
		521241	521211	11.736.159
	00105T	521241	521211	7.886.642
		522192	522151	21.000.000
04679T	522192	522151	3.650.000	
06031T	522192	522151	3.600.000	
07983T	522192	522151	1.800.000	
PPK PPN IV	05489T	521241	521211	20.610.000
		522192	522151	16.800.000
	05490T	521241	521211	5.020.000
		522192	522151	1.800.000
	05491T	522192	522151	5.000.000
		521241	521211	735.000
		521241	521211	5.087.500
	05515T	522192	522151	2.000.000
		522192	522151	2.700.000
		521241	521211	2.190.000
	05516T	522192	522151	3.150.000
		522192	522151	8.400.000
		522192	522151	6.750.000
		522192	522151	14.500.000
	05664T	522192	522151	1.100.000
		521241	521211	2.812.000
		522192	522151	1.600.000
		522192	522151	8.950.000
	05678T	522192	522151	9.700.000
		522192	522151	10.700.000
		522192	522151	3.000.000
		522192	522151	19.200.000
	05920T	522192	522151	1.490.000
		521241	521211	6.510.000
		521241	521211	7.972.500
	05922T	521241	521211	3.502.500
		522192	522151	481.000
	05923T	521241	521211	592.000
	05924T	522192	522151	18.000.000
		522192	522151	4.900.000
		522192	522151	4.900.000
		522192	522151	7.600.000
	05962T	522192	522151	2.600.000
		522192	522151	10.300.000
		522192	522151	8.200.000
	06015T	522192	522151	1.000.000
		522192	522151	1.800.000
	06344T	522192	522151	9.000.000
		522192	522151	4.600.000
		522192	522151	2.100.000
522192		522151	8.650.000	
06526T	522192	522151	13.200.000	
	522192	522151	1.800.000	
	522192	522151	1.000.000	
	522192	522151	17.800.000	
06709T	522192	522151	14.000.000	
	522192	522151	3.600.000	
	522192	522151	3.000.000	
	522192	522151	1.200.000	
06977T	522192	522151	1.900.000	
	522192	522151	52.025.000	
07634T	522192	522151	9.900.000	
	522192	522151		
	522192	522151		
	522192	522151		
07636T	522192	522151	1.900.000	
PPK PPN II	06265T	522192	522151	52.025.000
	05733T	522192	522151	9.900.000
TOTAL				545.120.202

1. Realisasi Belanja Kementerian PPN/Bappenas hanya sebesar 91,71%, antara lain disebabkan karena kebijakan yang timbul akibat pandemi Covid-19 antara lain :
 - a. Pemotongan anggaran yang besar mengakibatkan kegiatan menjadi berkurang;
 - b. Pembatasan pelaksanaan konsinyering karena adanya prosedur kesehatan yang harus dilaksanakan sehingga mengurangi jumlah kegiatan dan peserta;
 - c. Terbatasnya pelaksanaan perjalanan dinas baik didalam maupun diluar negeri karena tutup/terbatasnya penerbangan yang ada serta adanya prosedur kesehatan yang harus diikuti;
 - d. Banyaknya rapat dilakukan dengan online via aplikasi zoom sehingga belanja keperluan perkantoran menjadi berkurang;
 - e. Dengan adanya pemberlakuan WFH banyak kegiatan yang menyerap anggaran menjadi berkurang.

F.2.3. Implementasi Kegiatan *Stunting*

Program *Stunting* di Bappenas terbagi menjadi 2 kegiatan yaitu Komponen 640 Koordinasi Strategis Gerakan dan Percepatan Perbaikan Gizi dan Komponen 643 Hibah *Investing in Nutrition and Early Years Projects* (INEY). Adapun penyerapan 2 kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 127 Indikasi Konvergensi Implementasi Kegiatan Stunting DIPA Bappenas

No (a)	Program/Kegiatan/Output (b)		Pagu (c)	Realisasi (d)	% (e)
	055 01 06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional			
	2 3	Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat			
	608	Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan			
		Komp. 640 Koordinasi Strategis Gerakan dan Percepatan Perbaikan Gizi	731.594.000	685.236.500	93,663%
		D. Hibah Investing in Nutrition and Early Years Project (INEY)	14.300.000.000	5.594.188.736	39,12%

Beberapa capaian utama kegiatan antara lain: (a) Harmonisasi rancangan Perpres Percepatan Penurunan *Stunting*; (b) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG di tingkat daerah (regional barat dan regional timur); (c) pengembangan *dashboard* monitoring dan evaluasi program percepatan penurunan *stunting*; (d) penyusunan ringkasa *output* K/L TA 2020 yang mendukung percepatan penurunan *stunting*; (e) pengembangan sistem penandaan tematik *stunting* pada KRISNA; (f) penyusunan kriteria praktik baik program percepatan penurunan *stunting*; (g) bimbingan teknis pelaksanaan aksi konvergensi di Kabupaten/Kota; (h) pengelolaan media sosial; (i) penyusunan reviu pelaksanaan DAK *stunting* TA 2019; (j) pertemuan pelaporan aksi konvergensi untuk pencairan Dana Desa; (k) reviu kinerja anggaran dan pembangunan semester 1 program percepatan penurunan *stunting*; (l) penyusunan ringkasan kebijakan dampak pandemi terhadap status gizi Balita di Indonesia; *Scaling Up Nutrition Annual Meeting* Tahun 2020. Penyerapan anggaran bersumber dari Hibah INEY di bawah 50 persen karena *No Objection Letter* (NOL) atas *Annual Work Plan Budget*

(AWPB) dari Bank Dunia terbit pada bulan Maret 2020. Pada bulan Maret 2020, terkait Pandemi Covid-19 berlaku kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga kegiatan yang bersifat pertemuan langsung dan perjalanan dinas ke luar kota tidak dapat dilaksanakan. Izin kegiatan yang bersifat daring dan luring serta perjalanan dinas ke luar kota baru keluar pada bulan September.

F.2.4. Tuntutan Hukum

Terdapat satu tuntutan hukum Pasca Kerusakan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 yang telah memiliki hukum tetap (*inkracht*) yang tertuang pada yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2012 No: 318/PDT.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Mei 2015 No:116/PDT/2015/PT.DKI jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal tanggal 19 Oktober 2017 No:1950/Pdt/2016 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juli 2019 No:451 PK/Pdt/2019 sebagai berikut :

No	Nomor Perkara Deskripsi Perkara	Penggugat Tergugat	Status		Gugatan/Petitum		Potensi Pengeluaran Negara					Amar Putusan
			Status	Ket	Materiil	Immateriil	Rupiah	Valas	Tanah	Immateriil	Keterangan	
1	No. Perkara: 451PK/PDT/2019 Pokok Gugatan: Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan ganti rugi harta benda materiil dan immateriil pasca kerusakan Maluku-Maluku Utara tahun 1999	Penggugat: 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan 2. Gubernur Maluku Utara 3. Menteri Keuangan 4. Kepala Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku 5. Gubernur Maluku 6. Gubernur Sulawesi Tenggara 7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi 9. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 10. Kepala Kantor Perwakilan Propinsi Maluku Utara 11. Presiden RI 12. Menteri Sosial 13. Kepala Kantor Perwakilan Pemda Sulawesi Tenggara 14. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tergugat: 1. Syamsuni Launa, dkk	Inkracht		IDR 3.994.523.616.000		IDR 3.994.523.616.000					permohonan PK Pemohon ditolak, maka putusan sebelumnya yaitu putusan kasasi Nomor 1950 K/PDT/2016 yang dimohonkan PK tetap berlaku

Tuntutan hukum tersebut senilai Rp3.944.514.500.000,00 yang nantinya akan ditanggung renteng oleh 10 instansi. Tuntutan ini belum dianggarkan ke dalam DIPA sehingga belum dilakukan pencatatan atas utang.

Status	Jumlah Perkara	Potensi Material			Immaterial
		Rupiah	Valas	Tanah	
Belum Inkracht	0	0,00			
Inkracht	3	3.994.523.616.000,00	USD		
Total	3	3.994.523.616.000,00	USD		

F.2.5. Likuidasi Satker MCC dan KNKS

Pada tahun anggaran 2020, terdapat 2 (dua) satker yang dilakukan proses likuidasi yaitu Satker MCC dan Satker KNKS. Pada proses likuidasi Satker MCC terdapat transfer aset kepada Satker Bappenas, Satker Direktorat Gizi Masyarakat dan Direktorat Kesehatan Lingkungan (Kementerian Kesehatan), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 128 Rincian TK/TM Satker MCC

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Jenis Aset	Tujuan	Transfer Keluar	Transfer Masuk
1	Pengelola Hibah MCC	Software	Kementerian PPN/Bappenas	1.459.630.553	1.459.630.553
2	Pengelola Hibah MCC	Akumulasi Amortisasi Software	Kementerian PPN/Bappenas	-937.439.417	-937.439.417
3	Pengelola Hibah MCC	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kementerian PPN/Bappenas	-7.262.311.374	-7.262.311.374
4	Pengelola Hibah MCC	Peralatan dan Mesin	Kementerian PPN/Bappenas	7.314.138.076	7.314.138.076
5	Pengelola Hibah MCC	Lisensi	Kementerian PPN/Bappenas	5.394.226.767	5.394.226.767
6	Pengelola Hibah MCC	Akumulasi Amortisasi Lisensi	Kementerian PPN/Bappenas	-2.401.279.514	-2.401.279.514
Total				3.566.965.091	3.566.965.091
7	Pengelola Hibah MCC	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Direktorat Gizi Masyarakat	-260.300.000	-260.300.000
8	Pengelola Hibah MCC	Peralatan dan Mesin	Direktorat Gizi Masyarakat	260.300.000	260.300.000
Total				0	0
9	Pengelola Hibah MCC	Peralatan dan Mesin	Direktorat Kesehatan Lingkungan	260.300.000	260.300.000
10	Pengelola Hibah MCC	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Direktorat Kesehatan Lingkungan	-260.300.000	-260.300.000
Total				0	0
11	Pengelola Hibah MCC	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	LKPP	-11.887.444.114	-11.887.444.114
12	Pengelola Hibah MCC	Peralatan dan Mesin	LKPP	23.981.187.447	23.981.187.447
Total				12.093.743.333	12.093.743.333

Sedangkan pada proses likuidasi Satker KNKS terdapat transfer aset kepada Satker Bappenas dan Sekretariat KNEKS (Kementerian Keuangan), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129 Rincian TK/TM Satker KNKS

(Dalam Rupiah)

No	Satker	Jenis Aset	Tujuan	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih
1	KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kementerian PPN/Bappenas	-1.483.155.715	-1.483.155.715	0
2	KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH	Peralatan dan Mesin	Kementerian PPN/Bappenas	3.642.975.638	3.642.975.638	0
3	KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH	Aset Tetap Renovasi	Kementerian PPN/Bappenas	145.850.000	145.850.000	0
4	KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH	Aset Tetap Lainnya	Kementerian PPN/Bappenas	3.003.668	3.003.668	0
Total				2.308.673.591	2.308.673.591	0
5	KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Sekretariat KNEKS	-344.161.820	0	-344.161.820
6	KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH	Peralatan dan Mesin	Sekretariat KNEKS	789.688.170	0	789.688.170
Total				445.526.350	0	445.526.350

Terdapat selisih transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk per 31 Desember 2020, yang disebabkan oleh tidak tercatatnya satker tujuan di aplikasi e-rekon KNEKS Kementerian Keuangan.

Selain itu terdapat perbedaan saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin, serta Akumulasi Amortisasi *Software* Satker MCC pada Aplikasi SIMAK dan SAIBA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 130 Rincian Selisih Antara SAIBA dan SIMAK MCC

No	Nama Satker	Uraian	Rph Saiba	Rph Simak	Rph Selisih
1	Pengelola Hibah MCC	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	-488.237.988	488.237.988
2	Pengelola Hibah MCC	Akumulasi Amortisasi Software	0	-79.019.852	79.019.852
Total			-	-567.257.840	567.257.840

Selisih berupa akumulasi penyusutan peralatan dan mesin serta akumulasi amortisasi software pada tahun 2019 audited telah dilakukan perbaikan (jurnal manual), namun pada tahun anggaran 2020 saldo selisih tersebut muncul kembali yang mengakibatkan perbedaan nilai antara saldo awal tahun pada Aplikasi SIMAK-BMN dengan E-Rekon, sehingga perlu dilakukan perbaikan saldo awal pada aplikasi. Perbedaan tersebut tidak mempengaruhi nilai yang disajikan dalam neraca (permasalahan hanya muncul dalam proses aplikasi

SIMAK dan SAIBA). Perbaikan tersebut sedang dalam proses tindak lanjut oleh tim dari SITP.

Terdapat perbedaan saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin, serta Akumulasi Amortisasi Software pada Satker MCC di Aplikasi SIMAK dan SAIBA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 131 Rincian Perbedaan Saldo Awal SIMAK dan SAIBA Satker MCC

No	Nama Satker	Uraian	Rph Saiba	Rph Simak	Rph Selisih
1	Pengelola Hibah MCC	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	-488.237.988	488.237.988
2	Pengelola Hibah MCC	Akumulasi Amortisasi Software	0	-79.019.852	79.019.852
Total			-	-567.257.840	567.257.840

Selisih berupa akumulasi penyusutan peralatan dan mesin serta akumulasi amortisasi software pada tahun 2019 yang telah diaudit dan telah dilakukan perbaikan (jurnal manual). Namun, pada tahun anggaran 2020 saldo selisih tersebut muncul kembali yang mengakibatkan perbedaan nilai antara saldo awal tahun pada Aplikasi SIMAK-BMN dengan *E-Rekon*.

Perbedaan tersebut tidak mempengaruhi nilai yang disajikan dalam neraca (permasalahan hanya muncul dalam proses aplikasi SIMAK dan SAIBA). Perbaikan tersebut sedang dalam proses tindak lanjut oleh tim dari SITP.

Jakarta, 5 Mei 2021

WA Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional *filia*



Suharso Monoarfa